

**ASPEK HUKUM PUTUSAN ARBITRASE ASING
DI DALAM SISTEM PERADILAN
DI INDONESIA**



(Skripsi)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Ajeng Juli Saraswati

NIM. E0005073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ASPEK HUKUM PUTUSAN ARBITRASE ASING
DI DALAM SISTEM PERADILAN
DI INDONESIA**

Disusun oleh :

AJENG JULI SARASWATI

NIM : E. 0005073

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Prof. DR. ADI SULISTIYONO, S.H., M.H.
NIP. 196302091988031003

PUJIYONO, S.H., M.H.
NIP. 197910142003121001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
ASPEK HUKUM PUTUSAN ARBITRASE ASING
DI DALAM SISTEM PERADILAN
DI INDONESIA

Disusun oleh :
AJENG JULI SARASWATI
NIM : E. 0005073

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :
Tanggal :

TIM PENGUJI

1. AMBAR BUDI S, S. H., M. H. :
Ketua
2. PUJIYONO, S. H., M. H. :
Sekretaris
3. PROF. DR. ADI SULISTIYONO, S. H. M. H. :
Anggota

MENGETAHUI
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.
NIP. 196109301986011001

ABSTRAK

Ajeng Juli Saraswati, E 0005073. 2010. ASPEK HUKUM PUTUSAN ARBITRASE ASING DI DALAM SISTEM PERADILAN

DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan putusan arbitrase asing di dalam sistem peradilan di Indonesia dengan melihat mengkaji pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, upaya hukum terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini, yang mencakup bahan hukum primer yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya seperti Undang-Undang, Keppres dan PERMA, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, dan bahan hukum tertier yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan silogisme deduksi yaitu suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kearah yang bersifat khusus.

Berdasarkan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa putusan arbitrase asing bersifat *final and binding*. Sehingga, putusan arbitrase asing tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK). Namun dalam realita yang ada, putusan arbitrase asing “banyak” yang digugat ke Pengadilan Negeri. Disini hakim Pengadilan Negeri seharusnya tidak berhak memeriksa sengketa yang ada klausul arbitrasenya (Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999). Akan tetapi, disini hakim adalah orang yang dianggap mengerti hukum (*Ius Curianovit*) sehingga tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kata Kunci : Putusan arbitrase, putusan arbitrase asing, sistem peradilan.

ABSTRACT

Ajeng Juli Saraswati, E 0005073. 2010. *LEGAL ASPECTS IN FOREIGN AWARD JUSTICE SYSTEM in INDONESIA. Law Faculty Sebelas Maret University.*

This study aimed to find out how the legal aspects of the enforcement of foreign arbitration in the judicial system in Indonesia with a view to study the enforcement of foreign arbitration in Indonesia, the legal effort against the decision of a foreign arbitration in Indonesia as well as constraints in the execution of foreign arbitration decision.

This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. The data used in this study is the type of secondary data is data obtained through assessment of existing libraries, which is associated with this research, which includes primary legal materials that are binding and underlie other legal materials, such as the Law, Decree and PERMA , secondary legal materials such as textbooks, dictionaries, law journals, and commentary on court decisions, and tertiary legal materials and explanations that give clues to primary and secondary legal materials, consisting of legal dictionaries, dictionaries Indonesian and free.

In this research, data collection techniques used are literature studies, namely by analyzing court decisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated. Furthermore, data obtained further processed and analyzed to answer the problem is being investigated. The data analysis technique used is the data analysis techniques with deductive syllogism is a technique to draw conclusions from things that are general to the direction that is specific.

*Based on the discussion yielded the conclusion that the foreign arbitration decision shall be final and binding. Thus, a foreign award can not be field an appeal, an appeal or judicial review. But in reality, the foreign award "many" who sued the District Court. District Court judge here should have no right to inspect the existing dispute arbitration clause (Article 3 of Law Number 30 Year 1999 Arbitration). However, here the judges are people who are considered to understand law (*ius Curianovit*) therefore should not be refused to examine, hear and decide the case which proposed to him (Article 16 paragraph (1) of Law Number 4 Year 2004 on Judicial Power.*

Keywords: *arbitration decision, the decision of a foreign arbitration, the judicial system.*

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.”

(QS Al Baqarah : 45)

“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS Al Baqarah: 216)

*Kesuksesan dan keberhasilan itu sebenarnya tidak jauh dari mata.
Kemauan dan keyakinanmu untuk meraih adalah kunci kesuksesan.*

- Penulis -

*Jangan pernah ragu dengan apa yang kita perbuat.
Hadapi semua yang terjadi dalam hidup ini dengan penuh keyakinan.
Karena keyakinanlah yang akan membuat yang tidak bisa menjadi bisa.*

- Penulis -

Sesungguhnya manusia itu tidak pernah mempunyai daya sesuatupun, manusia hanya bisa berusaha dan berdo'a tetapi tidak pernah bisa menentukan apa yang akan terjadi. Manusia hanya sebatas menjalani takdir-Nya, Apa yang terjadi sudah menjadi kehendak-Nya, tetaplah tersenyum & senantiasa bersyukur, yakinlah apa yang telah, sedang dan yang akan terjadi itulah yang terbaik.

- Penulis -

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

- *Allah SWT, segalanya hanya ditangan Engkau;*
- *Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa selalu mendo'akan untuk kesuksesan dan keberhasilanku mengapai cita-cita dan kebahagiaanku;*
- *Kakak dan adik tercinta yang selalu membantu dan mendukungku;*
- *Semua sahabat-sahabatku telah berjasa membantuku selama ini;*
- *Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

KATA PENGANTAR

Assalmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“ASPEK HUKUM PUTUSAN ARBITRASE ASING DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada segenap pihak yang dengan kerelaannya telah memberi bantuan, bimbingan, peran serta/dukungan serta pertolongan baik materiil maupun immateriil sejak awal hingga akhir penyusunan laporan penulisan hukum (skripsi) ini. Tiada penghargaan yang lebih tinggi, kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Prof. DR. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, ilmu, dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Pujiyono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang di dalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Winarno Budi S, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, pencerahan dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
8. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
9. Kedua orang tua dan kakak adik tercinta serta keluarga besar Almh. Ibu Harto Mulyono, yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih penulis. Semoga penulis dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada penulis.
10. Mas Arief dan sahabat-sahabat kampus Fani, Ani, Niken, Rosita, Tikha, Fikha, Dessy yang selalu membantu penulis, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan dengan setia mendengar keluh kesah penulis.
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 FH UNS dan semua pihak yang telah membantu penulis. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akherat “Amin”.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Akhir kata penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin Ya Robal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, April 2010

Penulis,

AJENG JULI SARASWATI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase.....	10
a. Pengertian Arbitrase.....	10
b. Sejarah Arbitrase.....	14
c. Nama-nama Badan Arbitrase Asing.....	24
d. Prosedur Penggunaan Arbitrase.....	26
e. Prinsip-prinsip Arbitrase.....	31
2. Tinjauan Tentang Putusan Arbitrase.....	32
a. Pengertian Putusan Arbitrase.....	32

b. Pengertian Putusan Arbitrase Asing.....	35
3. Tinjauan Umum Tentang Teori Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Arbitrase.....	37
a. Pengertian Umum Tentang Eksekusi.....	37
b. Eksekusi Putusan Arbitrase.....	39
c. Eksekusi Putusan Arbitrase Asing.....	39
4. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan.....	42
B. Kerangka Pemikiran.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.....	48
1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia.....	48
2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia.....	58
a. Pembatalan Putusan Arbitrase Asing.....	59
b. Penolakan Putusan Arbitrase Asing.....	65
3. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing.....	67
a. Peranan Lembaga Peradilan Formal yang Masih Sangat Dominan.....	68
b. Kompetensi Pengadilan.....	69
c. Adanya Perjanjian Bilateral atau Multilateral dengan Indonesia (Asas Timbal Balik).....	70
d. Tumpang Tindih Peraturan.....	71
e. Tidak Ada Keinginan Secara Sukarela Dari Pihak yang Kalah.....	73
f. Bertentangan dengan Ketertiban Umum.....	74
4. Putusan Arbitrase Asing Yang Digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	77
a. Kasus Karaha Bodas <i>Company</i> (KBC) dengan Pertamina.....	77

b. Kasus <i>Bankers Trust Company, Bankers Trust International</i> dan PT. BT. Prima Securities Indonesia dengan PT. Mayora Indah Tbk.....	80
c. Kasus Pertamina dan Pertamina EP dengan PT. Lirik Petroleum.....	82
d. Kasus <i>Amco Asia Corporation</i> dengan <i>Republic of Indonesia</i>	83
e. Kasus ConocoPhillips dengan PT Sapta Sarana Personaprima.....	86

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	52
Gambar 3. Upaya Hukum Eksekusi Putusan Arbitrase Asing.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang sudah semakin berkembang ini masalah perdagangan menjadi semakin kompleks. Kebutuhan untuk saling berinteraksi dalam perdagangan dan bisnis ini menimbulkan adanya suatu hubungan yang membuka secara lebar terhadap kemungkinan adanya perselisihan dan persengketaan diantara pihak-pihak yang terlibat.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan dan bisnis yang semakin cepat inilah yang menuntut penyelesaian sengketa yang cepat pula, karena dengan membiarkan sengketanya berlarut-larut akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan dan biaya produksi meningkat. Akibatnya, konsumen adalah pihak yang paling dirugikan. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat (Suyud Margono, 2000:12), maka dunia bisnis disini menuntut cara penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan atau *informal procedure and can be put in motion quickly*.

Di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Menurut M. Yahya Harahap, Pengalaman dan pengamatan telah membuktikan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan relatif lambat dikarenakan (M. Yahya Harahap, 1993:232):

1. penuh dengan formalitas,
2. terbuka upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali sehingga jalannya proses penyelesaian, bisa berliku-liku dan memakan waktu yang sangat panjang. Bisa berbilang tahun bahkan puluhan tahun,

3. belum lagi munculnya berbagai upaya intervensi atau perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*), menyebabkan penyelesaian semakin rumit dan panjang.

Lembaga peradilan yang ada saat ini dipandang kurang mampu untuk menjamin terselesaikannya masalah yang disengketakan. Hal ini disebabkan karena sedemikian banyak masalah harus diselesaikan oleh pihak pengadilan sehingga harus menunggu giliran dan ditambah lagi dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, tenaga hakim yang ahli dalam bidang perdagangan dan bisnis masih kurang, sehingga prosedurnya semakin sulit dan biaya yang dikeluarkan juga semakin mahal. Menurut Zulkifli yang dikutip dalam tulisan Dedi Harianto yang berjudul *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Di Indonesia*, sekedar memberikan gambaran, betapa waktu yang dibutuhkan dalam prosedur gugatan melalui lembaga peradilan umum, dari proses pengajuan gugatan di pengadilan negeri sampai kepada memperoleh keputusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, membutuhkan waktu lebih kurang lima tahun (Dedi Harianto, *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Di Indonesia*, <http://www.library.usu.ac.id/download/fh/perda-dedi1.pdf> (diakses tanggal 28 Maret 2010)).

Oleh karena itu, para pihak lebih suka menggunakan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum/non-litigasi untuk menyelesaikan perkaranya, baik dengan cara mediasi, negosiasi, konsiliasi ataupun arbitrase. Paradigma non litigasi ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah *win-win solution* (Adi Sulistiyono, 2006:5).

Para pihak yang bersengketa juga tidak hanya perusahaan-perusahaan lokal saja tapi juga dengan perusahaan asing. Para pihak ini menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya terpenuhi dan kekuasaannya

diperhatikan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Sehingga para pihak lebih memilih menggunakan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan pertentangan (*adversarial*) dengan hasil *win lose* yang dipilih sebagai alternatif oleh pelaku bisnis (Adi Sulistiyono, 2006:139).

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif lembaga penyelesaian sengketa di bidang perdagangan sangat diperlukan. Di Indonesia, kedudukan arbitrase diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alasan-alasan memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, antara lain :

1. Bersifat rahasia (*confidential*), sehingga menjamin kerahasiaan para pihak.
2. Prosedurnya sederhana dan cepat
 - a. Maksimal 180 hari / 6 bulan, jika melebihi 180 hari maka diperiksa atau diperpanjang waktunya sesuai kesepakatan
 - b. Keputusannya *win-lose solution* yang diminimalisir.
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih orang / lembaga (arbiter) yang akan menyelesaikan sengketa.
4. Putusannya bersifat *final, binding* (mengikat) dan memiliki daya paksa.

Selain itu, masih ada beberapa kelebihan dipilihnya Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yaitu (Suyud Margono, 2000:2) :

1. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
2. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

Dengan kelebihan-kelebihan ini maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih diminati daripada proses peradilan/litigasi, terutama untuk kontrak bisnis yang bersifat internasional. Dalam prakteknya terkadang dijumpai ternyata apa yang disebutkan di atas tidak dapat berjalan sesuai yang

diinginkan. Di beberapa negara terkadang praktek arbitrase dapat memakan waktu yang lebih lama dari pengadilan, atau bahkan biaya yang dikeluarkan justru lebih besar daripada penyelesaian lewat pengadilan. Terlepas dari itu kelebihan arbitrase lebih dapat dirasakan dari putusannya yang bersifat *final and binding*, juga sifat kerahasiaannya arbitrase dari mulai proses hingga putusan yang tidak dipublikasikan.

Putusan Arbitrase kini telah dipandang sedemikian penting dan kuat. Sifat putusan yang *final dan binding*, merupakan alasan mengapa para pelaku bisnis internasional memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketa karena dengan tidak terbukanya peluang banding dan kasasi maka kepastian hukum telah nampak jelas dalam putusan. Pelaksanaan putusan arbitrase oleh para pihak harus dipandang sebagai konsekuensi dipilihnya arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya, para pihaklah yang memilih hakimnya sendiri, bahkan terhadap pilihan hukumnya, maka pelaksanaan dari putusan arbitrase pun secara sadar merupakan kebutuhan dari para pihak itu sendiri. Karena itikad baik para pihak untuk melaksanakan isi putusan arbitrase merupakan faktor utama dalam penyelesaian sengketa bisnisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan mengenai prosedur suatu putusan arbitrase dapat dilaksanakan (dieksekusi) dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 69.

Putusan arbitrase yang bersifat *final dan binding* ini, memang merupakan alasan bagi pelaku bisnis internasional memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketanya. Namun dalam prakteknya bila tidak ada keinginan secara sukarela untuk melaksanakan hasil putusan, maka masalah eksekusi putusan arbitrase tersebut akan menjadi urusan yang rumit. Pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase asing sangatlah rumit, karena tidak hanya tinggal melaksanakan putusannya begitu saja seperti halnya terhadap putusan dari pengadilan konvensional ataupun terhadap putusan arbitrase domestik. Kemampuan untuk dapat dieksekusikannya suatu putusan arbitrase asing haruslah memenuhi berbagai macam persyaratan terlebih dahulu, karena

dalam hal ini akan menyangkut beberapa negara, baru setelah itu proses eksekusi yang akan juga menjadi bagian permasalahan tersendiri.

Melihat berbagai masalah yang muncul dalam putusan arbitrase, penanganan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase asing, memberikan gambaran bahwa permasalahan eksekusi merupakan masalah yang rumit yang terkandung dalam dirinya, tali temali dengan putusan lain atau bahkan dapat melibatkan pihak penguasa atau pemerintah (Djazuli Bachar, 1995:1). Berawal dari berbagai masalah yang justru ada di tengah berbagai keunggulan yang didapatkan dari arbitrase dalam usaha penyelesaian sengketa bisnis di era globalisasi ini, ternyata permasalahan eksekusi sebagai bagian penting dalam usaha penyelesaian sengketa merupakan suatu yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Sehingga pengetahuan yang menyeluruh terhadap arbitrase dari mulai aspek hukumnya, hingga yang terpenting adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam penulisan hukum (skripsi) ini akan dibahas mengenai aspek hukum putusan arbitrase asing di dalam sistem peradilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Perumusan Masalah merupakan pertanyaan penulis mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, sehingga dengan perumusan masalah yang jelas dapat memberikan jalan yang lebih mudah dalam memecahkan permasalahan. Adapun masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana aspek hukum putusan arbitrase asing di dalam sistem peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Berangkat dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui tentang aspek hukum putusan arbitrase asing di dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hukum perdata khususnya tentang aspek hukum dan putusan arbitrase asing di dalam sistem peradilan di Indonesia.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan yang ingin diperoleh dari suatu penelitian. Adapun dalam penulisan hukum ini, penulis mempunyai dua manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Untuk lebih mendalami teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai bahan panduan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan putusan arbitrase asing di dalam sistem peradilan di Indonesia.
- b. Hasil Penelitian ini dapat menambah kelengkapan koleksi pustaka dan menjadi dasar pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam upaya untuk mengumpulkan data dan analisis data dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penelitian hukum ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:14).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10). Penulis berusaha menggambarkan tentang bagaimana aspek hukum putusan arbitrase asing di dalam sistem peradilan di Indonesia.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian hukum mencakup :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945.
- 2) HIR, RBg dan Rv
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Konvensi New York Tahun 1958.
- 6) Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Konvensi New York Tahun 1958.

7) PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13), terdiri dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian seperti buku-buku tentang arbitrase.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13).

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum ini adalah sumber data yang sesuai dengan jenis data yang diperoleh penulis yaitu sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dengan cara meminjam buku-buku yang relevan dengan penelitian di perpustakaan (*library research*). Sumber data yang lain yang diperoleh melalui *browsing* artikel-artikel atau dokumen-dokumen yang ada di internet yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap dan memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Untuk mengumpulkan data tersebut, maka perlu dilakukan dengan cara atau dengan teknik tertentu. Penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Inventarisasi peraturan

Inventarisasi peraturan dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan penelitian. Tujuan diadakan inventarisasi peraturan adalah untuk mengadakan sinkronisasi antara peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan penelitian hukum ini serta untuk memperoleh data sekunder yang bersifat mengikat dan mendasari suatu penelitian.

b. Inventarisasi kepustakaan

Inventarisasi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan memanfaatkan buku-buku, artikel-artikel dan sebagainya untuk memperoleh data sekunder yang menunjang kelengkapan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi (Soerjono Soekanto, 1986:251).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam Penulisan Hukum ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti serta kerangka pemikirannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahsannya dengan teknik analisis data yang telah ditentukan dalam sub bab metode penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

a. Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit. Sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang “wasit” (*referee*) (Munir Fuady, 2000:12). Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian arbitrase dari banyak pendapat yang dapat dijadikan batasan dari arbitrase.

Dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* disingkat BRv atau Rv Tersebut istilah *Arbitrage* (bahasa Belanda) yang mengandung pengertian dalam bahasa Inggris : “*arbitration*”, yang dirumuskan sebagai *the submission for determination of disputed matter to privat unofficial persons selected in manner provided by law or agreement* (Akhmad Ichsan, 1992:10).

Menurut Yahya Harahap, arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 1991:108) :

- 1) Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa :
 - a) Kontraversi pendapat (*controversy*) ;
 - b) Kesalahan pengertian (*misunderstanding*) ;
 - c) Ketidaksepakatan (*disagreement*).
- 2) Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) termasuk di dalamnya adalah :
 - a) Sah atau tidaknya kontrak ;

- b) Berlaku atau tidaknya kontrak.
- 3) Pengakhiran kontrak (*termination of contract*).
- 4) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan hukum.

Menurut A. Abdurrachman, arbitrase ialah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan yang diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan atau arbitrator tersebut dapat dipilih dari pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator....(A. Abdurrachman, 1991:50). Menurut Huala Adolf, arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan yang bersifat *final* dan mengikat (*binding*) (Huala Adolf, 2004:23).

Menurut Dion Barus, "*Arbitration an arrangement for taking an abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation*"(Dion Barus, Kemungkinan Diajukannya Perkara Dengan Klausul Arbitrase Ke Muka Pengadilan, <http://dionbarus.wordpress.com/2008/03/03/putusan-komersial-arbitrase-asing-di-indonesia/> (diakses tanggal 17 Juli 2009)).

Menurut Munir Fuady , ada beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, diantaranya sebagai berikut (Munir Fuady, 2000:13):

- 1) Adanya kontroversi di antara para pihak,

- 2) Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter,
- 3) Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu,
- 4) Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum,
- 5) Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian,
- 6) Arbiter melakukan pemeriksaan perkara,
- 7) Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan Putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang (Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) :

- 1) Perniagaan,

Perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa atau keduanya.

- 2) Perbankan,

Perbankan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3) Keuangan,

Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka.

4) Penanaman modal,

Penanaman modal adalah suatu yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.

5) Industri,

Industri adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba.

6) Hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Ruang lingkup HaKI mencakup, hak cipta, hak merek, hak paten, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan varietas tanaman (Abdul Bari Azed, 2006:3).

Sudargo Gautama memberikan pengertian arbitrase internasional secara agak luas menurutnya arbitrase akan bersifat internasional jika beberapa hal terpenuhi, yaitu (Sudargo Gautama, 1989:3-4):

- 1) Apabila para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha (*places of business*) mereka di negara-negara yang berbeda.

- 2) Jika tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka.
- 3) apabila suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana obyek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*), memang letaknya di luar negara tempat usaha para pihak.
- 4) apabila para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa obyek perjanjian mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Dalam tulisan ini penulis memilih kata arbitrase asing dengan maksud untuk memudahkan penyebutan dan menspesifikan arti dari istilah "asing" itu sendiri, dengan memaknai "asing" disini adalah sama dengan luar negeri seperti yang dimaksud dalam Konvensi New York 1958. Jadi arbitrase asing disini dimaksudkan lebih kepada arbitrase yang berada di luar batas yurisdiksi maupun wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1990, untuk menjelaskan istilah " Putusan Arbitrase Asing " (Pasal 2) dan istilah " Putusan Arbitrase Internasional " (Pasal 1 ayat (9) dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).

b. Sejarah Arbitrase

Menelusuri dari sejarah, sebenarnya cikal bakal lembaga arbitrase sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, terus berkembang pada zaman Romawi dan Yahudi, seterusnya di negara-negara bisnis di Eropa seperti Inggris dan Belanda. Kemudian menyebar ke Perancis (1250), Scotlandia (1695), Irlandia (1700), Denmark (1795) dan USA (1870) (Huala Adolf, 1991:2).

Pada tanggal 24 September 1923 diselenggarakan Protokol Genewa yang bertujuan agar negara-negara bersedia mengakui

keabsahan klausula-klausula arbitrase yang dibuat disamping perjanjian utamanya yakni kontrak internasional dan juga untuk memajukan perdagangan internasional. Akan tetapi, di dalam Protokol Genewa 1923 terdapat kelemahan yaitu, tidak mengatur tentang adanya kewajiban untuk mengeksekusi putusan arbitrase yang dibuat di negara lain, meskipun negara yang bersangkutan telah meratifikasi protokol tersebut. Oleh karena itu pada tahun 1927 diselenggarakan Konvensi Genewa 1927 yang bersifat pelengkap terhadap Protokol Genewa 1923. Konvensi Genewa ini berlaku; bagi negara-negara penandatanganan atau yang meratifikasi Protokol Genewa 1923, terhadap putusan-putusan yang telah dibuat yang sesuai tidak menyimpang dengan ruang lingkup protokol, dan putusan arbitrase tersebut harus diakui mengikat dan dapat dilaksanakan di semua negara anggota.

Pada tahun 1958 diselenggarakan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau yang dikenal dengan nama Konvensi New York 1958. Konvensi ini diselenggarakan antara lain; karena lemahnya kekuatan eksekutorial putusan arbitrase asing dalam Protokol dan Konvensi Genewa serta tidak berkembangnya perdagangan internasional akibat perang dunia II. Konvensi New York 1958 adalah perjanjian multilateral yang menetapkan bahwa negara-negara peserta konvensi akan mengakui dan melaksanakan keputusan arbitrase asing sebagai keputusan yang bersifat mengikat dan akan melaksanakan seolah-olah keputusan tersebut merupakan keputusan *final* dari keputusan pengadilan dalam yurisdiksi mereka. Di dalam konvensi ini terdapat dua hal utama yang diatur, yaitu keabsahan perjanjian arbitrase dan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase. Kemudian konvensi ini diratifikasi di Indonesia melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981.

Pada tahun 1965 dibentuk ICSID (*The International Centre for the Settlement of Investment Disputes*). ICSID didirikan oleh World

Bank yang merupakan badan arbitrase internasional di bidang penanaman modal asing. Penyelesaian arbitrase melalui ICSID ini bersifat eksklusif dan akibatnya mengesampingkan kewenangan pengadilan dari setiap sengketa investasi yang diserahkan pada ICSID. Tidak ada upaya hukum provisi/ sementara menurut ICSID. Keputusan ICSID bersifat mengikat dan tidak ada peninjauan kembali oleh pengadilan atas putusan tersebut. Negara peserta konvensi harus mengakui dan melaksanakan keputusan ICSID sebagaimana keputusan *final* dari negara tersebut. Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, sehingga dalam menyelesaikan sengketa tentang penanaman modal asing pemerintah Indonesia tunduk pada Konvensi ICSID ini.

Saat ini, arbitrase sudah semakin berkembang. Banyak sengketa di bidang perdagangan diselesaikan melalui arbitrase. Bahkan di luar negeri atau pihak asing banyak yang lebih cenderung mengadakan hubungan perjanjian dengan klausul arbitrase. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain. Kedua, adanya keraguan akan sikap obyektivitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing. Ketiga, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang memeriksa dan memutus perkara yang berskala perdagangan internasional dan alih teknologi. Keempat, timbulnya dugaan dan kesan, penyelesaian sengketa melalui jalur formal badan peradilan memakan waktu yang lama (M. Yahya Harahap, 1991:4).

Di Indonesia, kita sudah lama juga mengenal lembaga arbitrase, bahkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv), yang berlaku sejak tahun 1849, juga terdapat pasal-pasal

tentang arbitrase. Pengaturan yang sangat sederhana ini praktis masih berlaku sampai sekarang.

1) Sejarah Arbitrase di Amerika dan Eropa

Arbitrase sebagai bentuk perwasitan di bidang proses peradilan di luar peradilan umum merupakan sarana yang sangat membantu menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak, khusus dalam hukum privat baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional, seperti dalam pelaksanaan perjanjian komersial dan perjanjian investasi (penanaman modal) (Akhmad Ichsan, 1992:1). Penggunaan istilah Hukum Privat disini dimaksudkan baik yang disebut *civil law* maupun *common law*.

Penelusuran tentang sejarah hukum tentang arbitrase ada yang berpendapat bahwa arbitrase mendapat akarnya dalam hukum-hukum gereja (*ecclesiastical law*). Yang jelas dalam sejarah hukum Inggris misalnya, terlihat bahwa arbitrase telah digunakan oleh asosiasi-asosiasi bisnis abad pertengahan (*medieval guilds*) di Inggris. Arbitrase juga sudah digunakan disana dalam transaksi-transaksi maritim tempo dulu (Munir Fuady, 2000:15). Undang-Undang yang paling tua di dunia tentang arbitrase adalah Arbitration Act (1697) di Inggris, Undang-Undang tersebut sampai sekarang telah mengalami beberapa perubahan.

Di Inggris dalam sejarah perkembangan arbitrase banyak mengalami pertentangan bahkan timbulnya sikap antipati terhadap lembaga arbitrase. Pada abad 18 menjadi *fashionable* disana bagi hakim-hakim untuk memutuskan bahwa *arbitrase clause / contract* bertentangan dengan *public policy* karena arbitrase dapat mengakibatkan *oust the jurisdiction (of the courts)*.

Di Perancis, arbitrase diatur dalam *Code de Procedure Civile* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) yang mulai berlaku sejak tahun 1806, yang kemudian sejalan dengan perkembangan zaman lahir undang-undang arbitrase tahun 1925, yang lebih memberikan tempat kepada sistem peradilan arbitrase ini (Munir Fuady, 2000:22).

Akan tetapi, dalam praktek dirasakan bahwa kewenangan dan yurisdiksi dari peradilan arbitrase ini masih belum memuaskan. Campur tangan badan peradilan konvensional dianggap masih terlalu kuat terhadap arbitrase. Karena itu, pada tanggal 14 Mei 1980, pemerintah Perancis mengeluarkan Dekrit (*decree*) yang memberikan kewenangan dan yurisdiksi yang lebih mandiri terhadap badan arbitrase, dimana badan peradilan pada prinsipnya tidak dapat mencampuri urusan arbitrase. Badan-badan peradilan konvensional bahkan mempunyai kewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas arbitrase. Namun begitu, banding terhadap putusan arbitrase ke badan peradilan umum diperkenankan dalam hal-hal tertentu saja.

Sedangkan di USA telah terdapat *Arbitration Act* (1925), yang asas-asanya masih berlaku dalam undang-undang (federal) yang sekarang. Karena hukum di USA berasal dari Inggris Raya, maka prinsip-prinsip hukum tentang arbitrase di USA juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Inggris, kecuali dalam beberapa hal yang secara detail ada perkembangan yang berbeda dalam praktek perundang-undangan dan praktek yurisprudensi (Munir Fuady, 2000:21).

Sejarah arbitrase di Belanda mempunyai keterkaitan dengan sejarah di Indonesia. Semula, hukum arbitrase yang diterapkan di negeri Belanda bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Perdata yang tidak jauh berbeda dengan hukum arbitrase di Indonesia yang berdasarkan pada *Rv*. Akan tetapi, kemudian dalam perkembangannya ternyata hukum arbitrase di negeri Belanda berbeda dengan hukum arbitrase di Indonesia. Hal ini disebabkan dua hal pokok sebagai berikut (Munir Fuady, 2000:23-24) :

- a) Perkembangan praktek arbitrase di negeri Belanda yang pesat telah memberi pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan hukum arbitrase disana. Sementara di Indonesia, praktek hukum arbitrase relatif tidak berkembang dan penyelesaian sengketa lewat arbitrase itu sendiri tidak populer.
- b) Dibentuknya peraturan arbitrase yang baru di negeri Belanda yang mulai berlaku sejak 1 Desember 1986. Peraturan ini merupakan buku keempat yang baru dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, mulai dari Pasal 1020 sampai dengan Pasal 1076. Sementara peraturan tentang arbitrase yang lama di Belanda termuat dalam Pasal 620 sampai dengan Pasal 657 Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya, yang mirip-mirip dengan ketentuan dalam Pasal 605 sampai dengan Pasal 651 *Rv* Indonesia.

2) Sejarah Arbitrase di Asia

Perkembangan arbitrase di kawasan Asia dapat terlihat dalam perkembangan institusionalisasi lembaga arbitrase ini. Dalam hal ini, Cina, Srilanka dan Philipina dianggap yang terdepan dalam perkembangannya dari segi institusionalisasi. Sedangkan di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sudah dibentuk pada tanggal 3 Desember 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN), tetapi perkembangan arbitrase di Indonesia dianggap masih belum bergeming, sementara itu keberadaan arbitrase khusus yang coba dibentuk Indonesia dalam rangka

penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan bank yang berdasarkan syariat Islam juga belum efektif berjalan.

Institusi penyelesaian sengketa alternatif di Philipina diarahkan terhadap pengembangan institusionalisasi ke tingkat pedesaan (*barangay*), yang dibentuk dengan dekrit (*decree*) Presiden No. 1508 Tahun 1978. Jalur penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan merupakan suatu hal terpenting. Dalam hal ini, telah dibentuk institusi mediasi penyelesaian sengketa di 42000 desa di seluruh Philipina. Bahkan begitu pentingnya kedudukan badan-badan mediasi ini sehingga seseorang tidak dapat langsung maju ke pengadilan untuk berperkara sebelum menunjukkan adanya sertifikasi dari Sekretaris Panel Mediasi yang menyatakan bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan tapi tidak berhasil (Munir Fuady, 2000:25).

Di Srilanka melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1958, pemerintah telah memformulasikan terbentuknya suatu badan konsiliasi. Undang-Undang tersebut diamendir dengan Undang-Undang No. 72 Tahun 1988 yang memformulasi terbentuknya Badan Mediasi. Dewasa ini telah ada ratusan panel mediasi di Srilanka dengan seluruh mediator sudah ribuan jumlahnya. Kedudukan mediasi di Srilanka sangatlah penting bahkan wajib diikuti terlebih dahulu sebelum perkara dibawa ke pengadilan-pengadilan konvensional.

Begitu juga di Jepang, tradisi menyelesaikan perkara di luar badan peradilan juga sudah sangat membudaya dalam kehidupan hukum kemasyarakatannya. Disana sudah lama dikenal *Konsiliasi Tokugawa (Atsukai, Naisai)*, yang merupakan bentuk konsiliasi tradisionalnya, di samping badan penyelesaian sengketa dalam arti

modern, seperti Konsiliasi informal (*Jidan*), Konsiliasi (*Chotel*) dan Kompromi (*wakai*).

Di Malaysia, penyelesaian sengketa alternatif juga populer, khususnya di kalangan bisnis. Sejak tahun 1978, disana sudah ada the *Kuala Lumpur Regional Center For Arbitration* (KLRC), yang melaksanakan tugasnya sebagai mediasi dan arbitrase, baik untuk sengketa domestik maupun sengketa Internasional. Di negara ini juga *Asia-Afrika Legal Consultative Committee* (AALCC), mempunyai pusat arbitrase untuk Asia. Sedangkan untuk Afrika dipusatkan di Kairo, dengan menggunakan *Uncitral Rules* (suatu prosedur arbitrase yang telah *acceptable* oleh PBB sejak tahun 1976).

Di Singapura, terdapat pusat arbitrase yang menangani kasus-kasus bisnis. Di samping itu badan arbitrase internasional yaitu *Singapore International Arbitration* yang terbentuk pada tahun 1990 juga sangat memegang peranan di kawasan ini dalam menangani sengketa-sengketa bisnis Internasional.

3) Sejarah Arbitrase di Indonesia

Jalur penyelesaian sengketa secara alternatif di luar pengadilan sesungguhnya sangat mungkin terjadi di masyarakat Indonesia dan sejak dahulu budaya ini telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sengketa-sengketa yang masih kuat memegang nilai kultur adat, jarang sekali dibawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka lebih suka membawanya lembaga yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau hakim adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan

dengan alasan ketidakefisienan proses peradilan dalam menangani sengketa (Suyud Margono, 2000:38).

Pada zaman Hindia Belanda badan peradilan yang ada saat itu adalah :

- a) Untuk golongan Eropa dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* sebagai peradilan sehari-hari dengan hukum acara yang digunakan termuat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* disingkat BRv atau Rv.
- b) Untuk golongan Bumiputera yang terdiri dari bangsa Indonesia asli dan mereka yang disamakan kedudukannya adalah *Landaard* sebagai peradilan sehari-hari dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, peradilan distrik dan sebagainya. Dengan hukum acara yang digunakan adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sedangkan untuk daerah luar jawa dan Madura adalah *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Bumiputera, baik HIR maupun RBg tidak mengatur tentang arbitrase. Hanya lewat Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg, ketentuan-ketentuan dalam Rv berlaku juga untuk golongan Bumiputera. Dengan berdasar pada Pasal 377 HIR, 705 RBg tersebut apabila seorang Bumiputera hendak tunduk pada peraturan orang Eropa, maka ketentuan arbitrase yang terdapat dalam Rv Pasal 615 sampai 651 juga diberlakukan bagi orang Indonesia.

Ketentuan dalam Rv mengenai arbitrase meliputi lima bagian yaitu :

- a) Bagian I, Pasal 615 sampai dengan Pasal 623 tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter.
- b) Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang Pemeriksaan Perkara di Depan Arbitrase.
- c) Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan Arbitrase.
- d) Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang Upaya-Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase.
- e) Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang Berakhirnya Perkara Arbitrase.

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai arbitrase masih berlaku untuk orang Indonesia. Pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdiri sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis diluar badan peradilan konvensional yang ada di Indonesia dengan anggaran dasar yang baru dibuat tahun 1985, yang tugasnya menyelesaikan sengketa ataupun sekedar memberikan pendapat yang mengikat (*binding advice*) untuk sengketa yang bersifat nasional maupun internasional. Sejak itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase terus berkembang pesat. Dibentuknya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) sebagai arbitrase khusus yang dibentuk dalam rangka penyelesaian sengketa khusus di bidang bisnis yang berdasarkan syariat Islam juga turut menyemarakkan perkembangan arbitrase di Indonesia.

Sejalan dengan berkembangnya arbitrase dalam praktek peradilan di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa

bisnis yang timbul dari suatu kontrak kebutuhan akan pengaturan mengenai masalah hukum arbitrase ini pun terus mendesak karena dirasa ketentuan yang ada sudah tidak memadai lagi, hingga pada tanggal 12 Agustus 1999 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Arbitrase maka ketentuan mengenai arbitrase yang sebelumnya diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatsblad 1874 : 52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement*, Staatblad 1941 : 44) dan Pasal 705 Reglement Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatblad 1927 : 227), dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut di atas.

c. Nama-Nama Badan Arbitrase Asing

Beberapa nama-nama badan Arbitrase Asing yang terkenal dan sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis Internasional, sebagai berikut :

- 1) *International Chamber of Commerce* (ICC) didirikan pada tahun 1923.
- 2) *American Arbitration Association* (AAA) didirikan pada tahun 1926.
- 3) *American Society of Maritimes Arbitration* (SMA).
- 4) *London Court of International Arbitration* (LCIA) didirikan pada tahun 1892.
- 5) *Centre For Dispute Resolution* (CEDR) di London didirikan pada tahun 1990.

- 6) *Australian Centre for International Commercial Arbitration* (AAICA) di Australia.
- 7) *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) yang didirikan pada tahun 1991.
- 8) *Regional Centre for Arbitration di Kuala Lumpur*, yang didirikan pada tahun 1978.
- 9) *Regional Centre for Arbitration di Kairo* atau yang disebut dengan *Asian-African Legal Consultative Committee*.
- 10) *British Columbia International Commercial Arbitration Centre* yang didirikan 1986.
- 11) *London Maritime Arbitrators' Association* (LMAA).
- 12) *Hongkong International Arbitration Centre* di Hongkong yang didirikan pada tahun 1985.
- 13) *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC).
- 14) *Korean Commercial Arbitration Board* (KCAB).
- 15) *Thai Arbitration Board*.
- 16) *Japan Commercial Arbitration Association* (JCAA).
- 17) *Vietnam International Arbitration Centre* (VIAC).
- 18) *The Arbitration Institute*, Stockholm.
- 19) *The International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID).
- 20) *Netherlands Arbitration Institute*.
- 21) *Interamerican Commission on Commercial Arbitration*.
- 22) *The International Commercial Arbitration Court* (ICAC) di Rusia.
- 23) *The Maritime Arbitration Commission* (MAC) di Rusia.
- 24) *The Arbitration (Tretejskyi) Court for Settlement of Economic Disputes* di Rusia.

d. Prosedur Penggunaan Arbitrase

Menyadari besarnya kemungkinan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional para pihak biasanya membuat klausul atau kontrak arbitrase dalam perjanjian atau kontrak bisnis yang dilakukan. Adapun tentang pemilihan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa oleh para pihak dapat dilakukan sebelum (*pactum de compromitendo*) atau setelah terjadinya sengketa (*akta kompromis*).

1) *Pactum de Compromitendo*

Istilah tersebut ditunjukkan kepada kesepakatan pemilihan arbitrase diantara para pihak yang dilakukan “sebelum” terjadinya perselisihan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengisyaratkan sebagai berikut :

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antar mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk perjanjian, maka ketentuan hukum kontrak yang berlaku. Ketentuan hukum kontrak tersebut bersumber dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu pula para pihak bebas untuk memilih apakah merumuskan klausul arbitrase terpisah dalam kontrak tersendiri untuk itu, atau ditempatkan menjadi bagian dari kontrak yang merupakan transaksi pokok, sebagaimana lazimnya dalam praktek (Munir Fuady, 2000:118).

Pada prinsipnya kontrak arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan (*accessoir*), tetapi ada beberapa sifat yang menyebabkan sifatnya sebagai *accessoir* tersebut tidak diikuti secara penuh, yaitu, jika perjanjian pokok batal maka kontrak arbitrase tidak menjadi batal (Pasal 10 huruf h Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).

2) *Akta Kompromis*

Istilah akta kompromis digunakan untuk mendefinisikan kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa tersebut. Dalam pembuatannya akta kompromis mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat yang apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat maka dapat membatalkan perjanjian atau akta tersebut dengan muatan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, yaitu :

- a) Harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b) Perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak.
- c) Jika para pihak tidak dapat menandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- d) Muatan wajib dari akta tertulis adalah sebagai berikut :
 - (1) nama lengkap pihak yang bersengketa ;
 - (2) tempat tinggal para pihak ;
 - (3) nama lengkap arbiter atau majelis arbitrase ;
 - (4) tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase ;
 - (5) tempat arbiter atau majelis arbitrase yang akan mengambil keputusan ;
 - (6) nama lengkap sekretaris ;
 - (7) jangka waktu penyelesaian sengketa ;
 - (8) pernyataan kesediaan dari arbiter ;
 - (9) pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase.

Dalam membuat kontrak arbitrase baik yang berdiri sendiri atau bersama perjanjian pokok, maka perumusan *arbitration clause* harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini perumusan *arbitration clause* sebagaimana dimaksud harus memenuhi beberapa ketentuan

standar. Perumusan *arbitration clause* yang salah dapat menimbulkan akibat yang fatal, faktor kehati-hatian dalam merumuskan klausul tersebut harus sangat diperhatikan agar pihak-pihak tidak ada yang merasa dirugikan nantinya.

Beberapa lembaga arbitrase telah menentukan tentang klausula standar yang digunakan oleh para pihak yang tentu saja dalam prakteknya klausula standar tersebut dapat dimodifikasi menurut keinginan para pihak. Hal ini terjadi karena klausula standar yang dirumuskan belum tentu dapat mengcover semua persyaratan yang dapat memenuhi keinginan para pihak (Huala Adolf, 1991:21) dalam perumusan kontrak arbitrase.

Model yang paling sederhana adalah :

Any dispute arising out of this agreement shall be settle by arbitration. (Setiap sengketa yang terbit dari perjanjian ini harus diselesaikan oleh arbitrase) (Munir Fuady, 2000:123).

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merekomendasikan model klausul arbitrase sebagai berikut :

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir“ (Huala Adolf, 1991:23).

United Nation Commission for International Trade Law (UNCITRAL) memberikan model klausula arbitrase sebagai berikut :

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as Present in force“ (Munir Fuady, 2000:123-124).

Selanjutnya para pihak dapat mempertimbangkan untuk menambah sebagai berikut :

- 1) *The appointing authority shall be....*
- 2) *The number of arbitration shall be....*
- 3) *The place of arbitration shall be....*
- 4) *The language (s) to be used in arbitral proceeding shall be...*

Model *International Chamber of Commerce (ICC)* :

“Any dispute arising in connection the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or mor arbitrators appointed in accordace with the said Rules“ (Huala Adolf, 1991:22).

Sedangkan *London Court of Arbitration* menyarankan klausula sebagai berikut (Munir Fuady, 2000:125-126) :

- 1) Untuk kemungkinan sengketa yang akan datang.
 - a) Klausula Arbitrase

“Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be refrred to and finally resolved by arbitration under the Rules of the London Court of International Arbitration, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this claus“.
 - b) Pengaturan hukum substantif yang mengatur persengketaan

“The governing law of this contract shall be the substantive law of....”.
 - c) Pengaturan tata cara pemilihan arbiter

“The tribunal shall consist of.... (satu atau tiga arbiter)“.

Jika yang dipilih tiga arbiter, maka LCIA menyarankan agar ditambah kata-kata sebagai berikut :

”....two of them shall be nominated by the respective parties”.
 - d) Pengaturan tempat arbitrase dan bahasa yang digunakan.

“The place of arbitration shall be....(nama kota). The language of the arbitration shall be....”.

2) Untuk sengketa yang sudah terjadi

“Any dispute having arising between the parties concerning....the parties hereby agree that the matter shall referred to and finally be resolved under the Rules of the London Court of International Arbitration“.

Suatu klausula arbitrase yang telah termuat dalam kontrak arbitrase baik yang dibuat bersama perjanjian pokok atau di luar perjanjian pokok, merupakan dasar yang kuat yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan permohonan penggunaan arbitrase bila terjadi persengketaan. Dalam penggunaan arbitrase dalam usaha penyelesaian sengketanya harus mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan dari lembaga arbitrase yang dipilih.

Adanya klausul tersebut menjadikan suatu kompetensi absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul dari kontrak bisnis yang dibangun para pihak. Karena kontrak yang dibangun oleh kedua belah pihak merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang telah membuatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

Ayat (1) : “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri“.

Ayat (2) : “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini“.

e. Prinsip-Prinsip Arbitrase

Menurut Munir Fuady agar dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang ampuh, arbitrase seharusnya menganut beberapa prinsip sebagai berikut (Munir Fuady, 2000:93-94) :

1) Efisien

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya.

2) *Accessibilitas*

Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat.

3) Proteksi Hak Para Pihak

Terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar.

4) *Final and Binding*

Keputusan arbitrase haruslah *final and binding* kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan “ *due process* ”.

5) *Fair and Just*

Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya.

6) Sesuai Dengan *Sence Of Justice* Dari Masyarakat

Dengan demikian akan lebih terjamin unsur “ *deterant* ” dari si pelanggar dan sengketa akan dapat dicegah.

7) *Credibilitas*

Para arbiter dan badan Arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.

Dari beberapa prinsip arbitrase di atas tentulah merupakan karakter yang dapat dijadikan ukuran dari keunggulan yang dimiliki oleh arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa bisnis.

3. Tinjauan Tentang Putusan Arbitrase

a. Pengertian Putusan Arbitrase

Dalam hukum acara perdata Indonesia Putusan Hakim (disini tidak dibedakan antara hakim Pengadilan Konvensional ataupun hakim (arbitrase) adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Sudikno mertokusumo, 1998:175).

Putusan hakim disini bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim dan putusan yang diucapkan di muka persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis).

Dalam sebuah literatur yang dikeluarkan oleh *Arbitration.com* menyebutkan definisi dari istilah putusan arbitrase yaitu, *An arbitration award is a decision of the neutral finding for and/or against a party and is made in writing. In most jurisdictions, the neutral is not required to render a written explanation of his/her decision with the award* (diakses tanggal 1 Maret 2009)

Suatu putusan arbitrase haruslah memuat data, analisis, kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin, dan putusannya tidak boleh kabur, tetapi haruslah pasti. Selain itu, bahasa yang dipakai pun harus bahasa yang jelas, tidak berliku-liku (Munir Fuady, 2000:103). Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase mempunyai isi

yang tidak jauh berbeda dengan isi suatu putusan Pengadilan Negeri (Munir Fuady, 2000:99).

Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 54 memberikan syarat minimum terhadap isi putusan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Putusan haruslah mempunyai irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Nama dan alamat para pihak.
- 3) Uraian singkat duduk sengketa.
- 4) Pendirian para pihak.
- 5) Nama dan alamat arbiter.
- 6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
- 7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal ada perbedaan pendapat antar arbiter, majelis arbitrase yang memutus perkara yang bersangkutan.
- 8) Amar putusan.
- 9) Tempat dan tanggal putusan.
- 10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Sehubungan persyaratan dari putusan arbitrase, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

Tentang putusan yang melebihi dari yang diminta oleh para pihak.

- 1) Keputusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan semata-mata (*et aequo et bono*).

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberi kewenangan untuk memutus secara “keadilan dan kepatutan” dan ini haruslah diartikan bahwa jika hal tersebut memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan resmi atas Pasal 56 ayat (1) tersebut.

- 2) Voting dalam pengambilan putusan jika tidak semua arbiter menyetujui isi putusan tersebut.

Dalam hal voting, Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberikan persyaratan Pasal 54 ayat (1) bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara arbiter tersebut, pendapat masing-masing arbiter yang saling berbeda tersebut harus disebutkan secara eksplisit dalam putusan yang bersangkutan.

Telah dijelaskan di muka bahwa sifat putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan ”putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Di dalam penjelasan dijelaskan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan *final* dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 dapat dijadikan batasan dalam rangka memahami tentang hakekat suatu putusan arbitrase, sementara itu putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh suatu badan arbitrase asing adalah mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pilihan hukum yang digunakan untuk prosedur penggunaan arbitrase yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

Sedangkan apabila Keputusan tersebut akan didaftarkan di pengadilan Indonesia dalam hal ini yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan aslinya dan apabila segala persyaratan pendaftaran terpenuhi maka Pengadilan dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa mengenai bentuk dan isi putusan.

b. Pengertian Putusan Arbitrase Asing

Pengertian putusan arbitrase asing, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini dijelaskan, yang dimaksud putusan arbitrase asing (menurut konvensi ini) ialah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan (*made in the territory of a states other than the states where the recognition and enforcement of such awards are sought*).

Perlu diingat, faktor perbedaan kewarganegaraan tidaklah mutlak. Persengketaan tidak mesti terjadi antara dua pihak yang saling berbeda kewarganegaraan. Bisa juga persengketaan terjadi antara orang-orang atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan yang sama, asal mereka sepakat persengketaan diselesaikan oleh badan arbitrase asing. Sebaliknya, putusan arbitrase diambil dalam wilayah satu negara meskipun putusan arbitrase yang bersangkutan tunduk dan didasarkan atas suatu konvensi internasional, putusan arbitrase yang demikian tidak dianggap putusan arbitrase "domestik". Putusan yang demikian dianggap putusan arbitrase asing (M. Yahya Harahap, 2003:21).

Di samping itu, yang termasuk pada putusan arbitrase asing Pasal 1 ayat (2) Konvensi, bukan hanya putusan-putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase *ad hoc* atau *arbitrator appointed for each case*, melainkan termasuk setiap putusan yang diambil oleh badan arbitrase "permanen" atau *permanent arbitral body* yang lazim juga disebut "arbitrase institutional".

Dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 diatur tentang arbitrase internasional, terutama aspek eksekusinya. Akan tetapi, undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebut-nyebut

tentang apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional itu. Apakah misalnya setiap putusan arbitrase luar negeri dapat dijalankan di Indonesia, termasuk jika putusan tersebut merupakan putusan arbitrase nasional negara lain. Karena Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa-apa, maka hal ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 tersebut tidak melakukan pembatasan-pembatasan terhadap jenis arbitrase. Asal syarat-syarat dalam undang-undang tersebut telah dipenuhi, maka putusan arbitrase tersebut sudah dapat dijalankan. Jadi, arbitrase internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 sebenarnya adalah "arbitrase asing" (Munir Fuady, 2000:183).

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam *New York Convention* (10 Juni 1958) yang memang mempersoalkan eksekusi putusan arbitrase asing (*foreign arbitral awards*), bukan hanya arbitrase internasional. Bahkan dalam sejarah hukum arbitrase Indonesia, juga yang dikenal adalah eksekusi putusan arbitrase asing. Hal ini terlihat misalnya dengan adanya Keppres No. 34 Tahun 1981 yang mengesahkan berlakunya *New York Convention* tersebut, maupun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990, tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Sementara itu, jika kita berbicara dengan arbitrase internasional (dalam arti sempit), yakni yang tidak termasuk arbitrase nasional negara lain, maka seperti yang dimaksud dalam model hukum arbitrase UNCITRAL, baru termasuk arbitrase internasional jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Munir Fuady, 2000:184) :

- 1) Jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara yang berbeda, atau
- 2) Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak, atau

- 3) Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada di luar bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya para pihak, atau
- 4) Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara.

3. Tinjauan Umum Tentang Teori Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Arbitrase

a. Pengertian Umum Tentang Eksekusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah eksekusi mempunyai arti yaitu, "pelaksanaan putusan hakim" atau dalam arti yang lain berarti "pelaksanaan putusan badan peradilan, khususnya hukuman mati" dan eksekusi dapat juga berarti "penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan".

Eksekusi bila diartikan sebagai *law enforcement* atau penegakan hukum, berupa suatu usaha nyata secara paksa untuk melaksanakan putusan karena para pihak atau salah satu pihak dalam putusan pengadilan tidak mau menaati secara sukarela. Namun disini, penegakan hukum sebagaimana ciri-ciri hukum itu sendiri menuntut kepatuhan lahir, oleh sebab itu bahwa *enforcement* tidak sekedar berarti pelaksanaan hukum disertai paksaan saja dalam arti bahwa kepatuhan semua orang untuk mematuhi hukum adalah untuk mencapai keadilan dan ketertiban atau atas kesadaran hukum bukan karena takut sanksi atau polisi. Pelaksanaan putusan oleh yang dikalahkan juga merupakan penegakan hukum, demikian juga pelaksanaan berdasarkan perdamaian para pihak. Dengan demikian eksekusi oleh pengadilan terhadap putusan pengadilan hanyalah merupakan sebagian dari penegakan hukum.

Pada dasarnya dalam Hukum Acara Perdata eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem peradilan perdata oleh suatu badan peradilan perdata, berada di luar proses sengketa. Hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari Hukum Acara Perdata yang terletak di ujung proses yang pada dasarnya tidak ditangani oleh hakim yang memutus perkara yang bersangkutan. Apabila dari segi yuridis materi isi putusan sudah memenuhi syarat. Maka isi putusan Pengadilan yang sudah sah secara material tersebut sungguh-sungguh sudah benar atautkah tidak menurut hukum, tidak merupakan masalah eksekusi.

Pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi) dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kegiatannya eksekusi mempunyai 2 (dua) segi kegiatan yaitu :

- 1) yang dilakukan dari segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh penegak hukum dan oleh setiap orang.
- 2) dan dari segi pelaksanaan secara fisik atau realisasinya. Dalam hal ini untuk sebagian besar tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Yang terpenting dari suatu eksekusi putusan pengadilan adalah bahwa eksekusi bertujuan tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi. Pengaturan masalah eksekusi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam bagian kelima mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR./S. 1941 No. 44 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan dalam bagian keempat Pasal 206 sampai dengan 225 RBg./S. 1927 No. 227 di luar wilayah itu.

b. Eksekusi Putusan Arbitrase

Suatu putusan arbitrase telah dipandang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena sifat putusan yang akhir (*final*) dan mengikat (*binding*) tidak ada banding dan kasasi.

Pada dasarnya bahwa tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase mengikuti sebagaimana Hukum Acara Perdata mengatur untuk pelaksanaan putusan perkara perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 dan Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam pelaksanaan eksekusi tersebut harus dibedakan terlebih dahulu tentang arbitrase yang mengeluarkan putusan yaitu arbitrase nasional/domestik atau arbitrase internasional atau asing.

Pengaturan tentang masalah eksekusi putusan Arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mulai Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 dengan pembagian Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 mengatur tentang pelaksanaan eksekusi untuk putusan arbitrase nasional sedangkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.

c. Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

Sejarah mulai dapat diakuinya dan dilaksanakannya suatu putusan arbitrase asing di dunia mulai terjadi saat dilakukannya usaha unifikasi hukum dagang internasional oleh Lembaga bangsa-bangsa (*Volkendbond, League of Nation*), melalui Konvensi Jenewa tentang pelaksanaan keputusan-keputusan arbitrase luar negeri tahun 1927 (26-9-1927) yang diratifikasi oleh 44 negara. Sejak itu Konvensi inilah yang telah menjadi dasar untuk dapat diterimanya pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam bidang perdagangan.

Setelah Perang Dunia II, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa "New York Convention 1958 atau *Convention on the Recognition and*

Enforcement of Foreign Arbitral Award’ ditandatangani pada kesempatan *United Nation Conference on International Commercial Arbitration*, Juni 1958.

Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1958 dimaksudkan untuk menggantikan Konvensi Jenewa yang dirasakan telah kurang cocok lagi, mengingat adanya perkembangan yang pesat daripada perdagangan internasional modern. Hasil Konvensi tahun 1958 ini dianggap dapat secara efektif memastikan pengakuan internasional dan pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan arbitrase oleh instansi-instansi peradilan di luar negeri (Sudargo Gautama, 1997:35).

Konvensi New York Tahun 1958 ini mulai berlaku bagi negara-negara yang menandatangani pada tanggal 7 Juli 1959. Dalam konvensi ini hanya mengatur tentang pokoknya saja tentang pelaksanaan keputusan arbitrase, tidak detail. Konvensi ini hanya menyebutkan saja tentang daya mengikat suatu keputusan dan tentang bagaimana pelaksanaan atau eksekusinya (Huala Adolf, 1991:82).

Selengkapnya Pasal III Konvensi ini menyebutkan :

” Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards “.

Terdapat dua syarat yang diperkenankan dalam konvensi ini, dalam rangka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di

suatu wilayah negara yaitu syarat Resiprositas (*reciprocity reservation*) dan persyaratan komersial (*commercial reservation*).

Dalam Pasal I Konvensi ini ditentukan :

” When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration “.

Dengan diterapkannya dua persyaratan ini maka konsekuensi untuk syarat yang pertama adalah bahwa negara yang bersangkutan baru akan menerapkan ketentuan konvensi apabila keputusan arbitrase tersebut dibuat di negara yang juga adalah anggota Konvensi New York. Apabila keputusan tersebut ternyata dibuat di negara yang bukan anggota, maka negara tersebut tidak akan menerapkan ketentuan konvensi. Konsekuensi diterapkannya persyaratan yang kedua adalah bahwa suatu negara yang telah meratifikasi Konvensi New York hanya akan menerapkan ketentuan konvensi terhadap sengketa-sengketa “komersial“ menurut hukum nasionalnya (Huala Adolf, 1991:80).

Sekarang hampir semua negara di dunia yang berkecimpung dalam perdagangan Internasional ikut serta dalam Konvensi New York ini dan perjanjian bilateral antara Republik Indonesia dengan negara lain mengenai asas ini sejauh ini belum ada (Sudargo Gautama, 1991:5).

Dalam penerapannya, banyak negara di dunia ini juga menerapkan syarat resiprositas dan komersial. Selain Indonesia,

Amerika Serikat dan negara-negara yang tergabung dalam CMEA (*Council For Mutual Economic Assistance*) seperti Bulgaria, Czekoslovakia, Republik Demokrasi Jerman, Hungaria, Rumania serta Rusia, semuanya menerapkan asas Resiprositas (Huala Adolf, 1991:86, 91).

Two factors will determine any future role for arbitration institutions: efficiency and legitimacy. While efficiency is the prerequisite, addressing threats to legitimacy is the biggest challenge that arbitration institutions will face in the future. Among many challenges, institutions will need to develop codes of conduct aimed at avoiding conflicts of interest on the part of arbitrators as well as institutional staff. The more institutions put in place transparent systems, the less susceptible they will be to encroachments by national courts (Nassib G. Ziadé, 'Reflections on the Role of Institutional Arbitration Between the Present and the Future' (2009) 25 *Arbitration International* pp. 427–430 (diakses tanggal 27 Maret 2010)).

Dewasa ini keputusan arbitrase asing pada prinsipnya sudah dapat dieksekusi di Indonesia. Pengakuan terhadap arbitrase asing di Indonesia, yang seyogianya tentu sudah dapat dieksekusi, telah terjadi sejak dikeluarkannya Keppres No. 34 Tahun 1981, yang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, yang dikenal dengan New York Convention 1958 (Dion Barus, Kemungkinan Diajukannya Perkara Dengan Klausul Arbitrase Ke Muka Pengadilan (<http://dionbarus.wordpress.com/2008/03/03/putusan-komersial-arbitrase-asing-di-indonesia> diakses tanggal 17 Juli 2009)

4. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya

ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut "stabilitas nasional". Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya disekelilingnya.

Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas/mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut (Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*(<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html> diakses tanggal 29 April 2010)).

Sistem Peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandangan, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub sistem hukum, yaitu :

1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda ini masih banyak yang berlaku diantaranya, KUHPerdara, KUHP, dll.
2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.
3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut sejarahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain, peradilan/pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Bukti adanya hubungan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan yang lainnya salah satu diantaranya adalah adanya “Perkara Koneksitas”.

Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dalam hal ini, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa

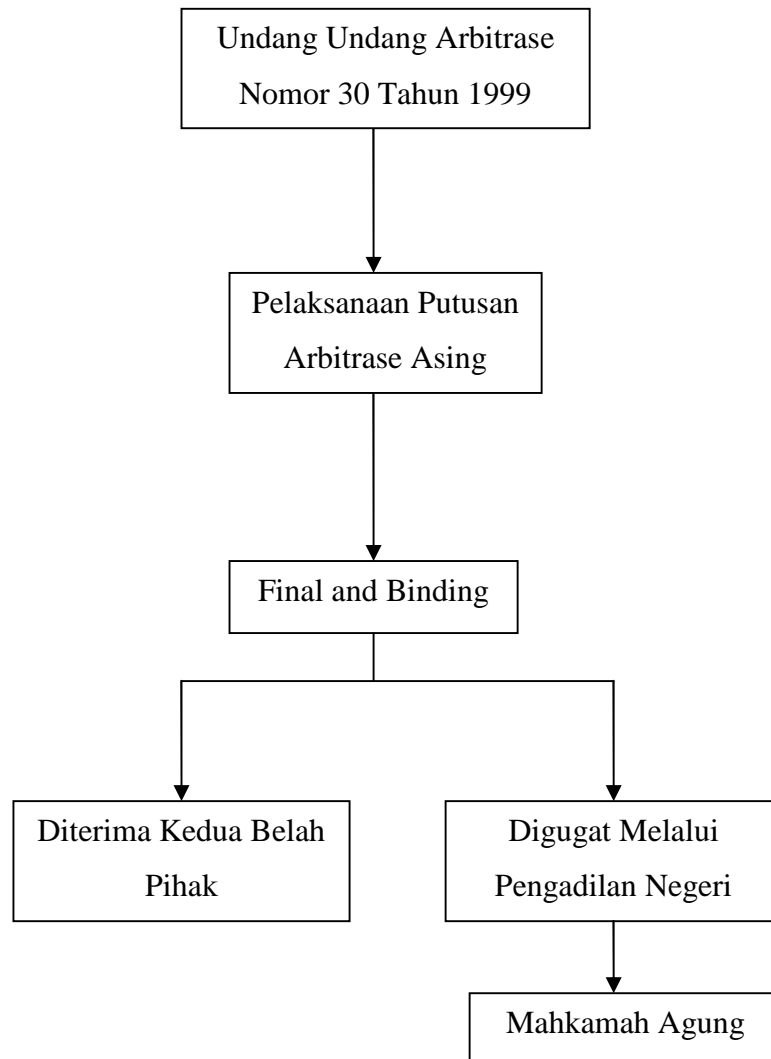
perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Disini arbitrase memiliki proses penyelesaian tersendiri atau ada badan penyelesaiannya tersendiri. Misalnya, BANI, ICSID dll sesuai dengan perjanjiannya. Akan tetapi, pendaftaran putusan arbitrase, eksekusi dan upaya hukum putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri. Sehingga, penyelesaian melalui arbitrase ini juga terkait dengan peradilan umum.

B. Kerangka Pemikiran

Masalah di bidang perdagangan pada era globalisasi ini semakin kompleks. Sehingga tidak menutup kemungkinan membuka perselisihan diantara para pihak. Dengan perkembangan bisnis di bidang perdagangan yang sangat cepat maka menuntut penyelesaian sengketa yang cepat pula. Selain itu, dibutuhkan juga cara penyelesaian sengketa yang efisien dan biaya ringan.

Saat ini, para pihak yang bersengketa dalam bidang perdagangan lebih memilih menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan/non-litigasi. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan harus melewati proses yang panjang, waktu yang lama dan biaya yang mahal. Sehingga para pihak lebih suka memilih penyelesaian melalui cara arbitrase yang kini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa bisnis yang terjadi tidak hanya di dalam negeri tapi juga internasional. Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur dalam pasal 65 sampai dengan 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding* sehingga memiliki kepastian hukum.

Putusan arbitrase asing yang sudah diputuskan oleh arbiter tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut. Para pihak yang bersengketa dapat melaksanakan dan menerima putusan arbitrase tersebut atau melakukan upaya hukum perlawanan dengan mengajukan pembatalan serta penolakan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ke Mahkamah Agung. Dalam realita, para pihak “banyak” yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal dalam kontrak perjanjiannya ada klausul arbitrasenya. Sehingga para pihak seharusnya mengajukan gugatannya ke lembaga arbitrase yang sudah ditentukan di dalam perjanjiannya.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia

Sudah sejak lama dianut asas bahwa sebenarnya suatu keputusan hakim dari negara tertentu hanya dapat dilaksanakan di dalam wilayah negara itu sendiri. Dalam Hukum Acara Perdata Indonesiapun menggunakan asas tersebut. Suatu putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia. Dianggap sebagai bertentangan dengan asas kedaulatan (*souvereignitas*) dari negara Republik Indonesia apabila dapat dilaksanakan keputusan-keputusan hakim luar negeri di dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 436 daripada *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv).

Setelah diratifikasinya Konvensi Jenewa 1927 dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda dengan Stbl. 1933 No. 131, maka sejak itu untuk putusan hakim arbitrase asing telah dapat dilaksanakan di Hindia Belanda. Namun setelah pengakuan kedaulatan RI, banyak kontroversi yang terjadi mengenai apakah masih berlakunya Konvensi Jenewa 1927 tersebut untuk Indonesia karena telah dinyatakan batalnya Konvensi Meja Bundar yang di dalamnya dinyatakan konvensi-konvensi yang tadinya oleh Nedtherland telah dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda apabila Republik Indonesia tidak menyatakan secara tegas tidak menghendaki lagi keterikatannya pada konvensi-konvensi yang bersangkutan. Tapi jika ditinjau dari Ketentuan dalam aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 juga dalam Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka segala perundangan dari pemerintah Hindia Belanda yang belum diganti dianggap sebagai masih berlaku dan merupakan peraturan tersendiri dari Republik Indonesia.

Undang-Undang Arbitrase di Indonesia, yaitu Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bagaimana jika suatu putusan arbitrase internasional dieksekusi di Indonesia, di mana beberapa ketentuan pokok pengaturan oleh Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang berhubungan dengan eksekusi terhadap suatu putusan dari arbitrase Dikeluarkannya Keppres No. 34 tahun 1981 yang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau yang dikenal dengan *New York Convention* 1958, merupakan penyesuaian terhadap aturan mengenai pengakuan Keputusan Arbitrase Asing yang telah berlaku secara Internasional menggantikan Konvensi Jenewa 1927 yang telah dianggap tidak sesuai.

Dalam pelaksanaanya di Indonesia ternyata membutuhkan adanya Peraturan Pelaksanaan, hingga munculah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Sejak saat itu baru keputusan Arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, sejak adanya Keppres No. 34 tahun 1981 hakim-hakim Indonesia telah terikat untuk melaksanakan keputusan Arbitrase luar negeri yang memang sudah mempunyai status “dapat dijalankan“ (*enforceable*) ini sepanjang keputusan arbitrase yang bersangkutan telah dibuat di negara juga peserta konvensi ini. Menurut Sudargo Gautama, jika hakim Indonesia menolak pelaksanaan keputusan arbitrase dagang luar negeri dari negara yang juga turut menjadi peserta konvensi PBB 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing, maka dapat saja dianggap telah melakukan suatu *International Wrong* (Sudargo Gautama, 1989:64). Sehingga dengan itu tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan lebih lanjut.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing berisikan aturan teknis yang diperlukan dalam rangka memperlancar upaya pemberian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia yang secara jelas

tidak dimuat dalam Konvensi New York, seperti badan peradilan yang berwenang menangani pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 PERMA yaitu :

“Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat“.

PERMA tersebut juga berisi tentang persyaratan untuk dapat dieksekusinya suatu putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia, tata cara permohonan untuk memperoleh eksekutur, tata cara sita dan pelaksanaan putusan juga tentang biaya eksekutur, yang semua ini sebelumnya cukup mempersulit eksekusi sehingga menyebabkan putusan tidak dapat dieksekusi di Indonesia, karena hal-hal tersebut memang tidak diatur dalam Konvensi New York 1958 namun Konvensi New York mengisyaratkan tidak adanya tempat bagi persyaratan dan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Yang harus dipakai hanyalah pelaksanaan menurut hukum acara keputusan arbitrase domestik dan mengenai hal tersebut jelas sudah diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa putusan arbitrase harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri biasa sehari-hari di tempat keputusan yang bersangkutan didaftarkan (Pasal 634 Rv).

Saat ini dengan telah dikodifikasikannya segala peraturan mengenai arbitrase di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka mengenai Eksekusi Putusan Arbitrase Asing telah jelas diatur yaitu pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dan keseluruhan ketentuan arbitrase dalam Rv dinyatakan tidak berlaku (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Tidak semua putusan arbitrase asing dapat dieksekusi di Indonesia. Akan tetapi, agar putusan tersebut dapat dieksekusi harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam

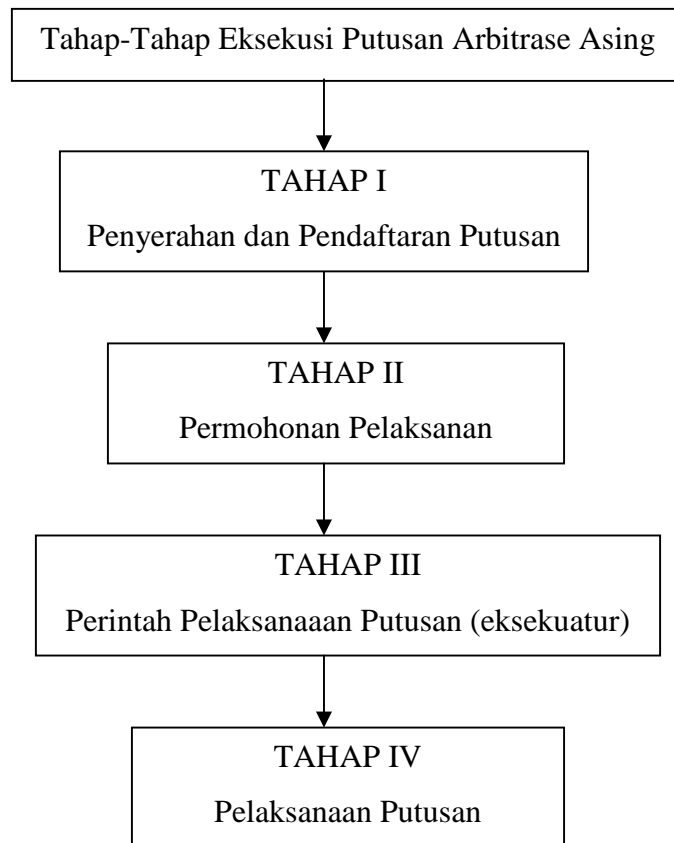
Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, yakni sebagai berikut :

- a. Putusan arbitrase asing dijatuhkan oleh arbitrase dari negara yang terikat perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Indonesia. Ini berarti asas *reciprositas* (saling mengakui) berlaku. Asas *repciprositas* adalah asas yang menyatakan bahwa putusan negara dimana arbitrase berasal harus pula dapat melaksanakan putusan arbitrase asing bila arbitrase tersebut berkedudukan di Indonesia.
- b. Hanya terbatas pada putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, HAKI). Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum menurut hukum Indonesia.
- d. Memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Jika menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia apabila sudah ada eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sekurang-kurangnya ada 4 (empat) tahap pelaksanaan putusan arbitrase asing, antara lain :

- a. Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan.
- b. Tahap permohonan pelaksanaan putusan.
- c. Tahap perintah pelaksanaan oleh Ketua Pengadilan Negeri (eksekutor).
- d. Tahap pelaksanaan putusan arbitrase.

Tahap-tahap pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat dilihat dalam diagram berikut ini :



Gambar 2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Agar dapat diberikan perintah pelaksanaan (eksekuatur) terhadap suatu putusan arbitrase asing, harus terlebih dahulu diajukan berkas-berkas permohonan eksekusi yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Permohonan pelaksanaan eksekusi.
- b. Lembar asli atau salinan otentik dari putusan arbitrase tersebut.
- c. Terjemahan resmi dari putusan arbitrase tersebut ke dalam bahasa Indonesia.
- d. Lembar asli atau salinan otentik dari kontrak yang menjadi dasar putusan arbitrase.

- e. Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari kontrak yang menjadi dasar putusan arbitrase.
- f. Surat keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara dimana diputuskan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral ataupun secara multilateral dengan Negara Republik Indonesia tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Putusan Arbitrase asing yang akan diminta pengakuan dan eksekusinya di Indonesia harus terlebih dahulu "dideponir" atau didaftarkan. Peraturan yang dijadikan dasar untuk mendeponir putusan arbitrase asing adalah ketentuan Pasal 65 sampai 69 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian, segala ketentuan yang menyangkut eksekusi putusan arbitrase asing tunduk pada aturan hukum negara dimana pengakuan dan eksekusi tersebut diminta. Jika pengakuan dan eksekusi diminta di Indonesia, maka tata cara pelaksanaannya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berwenang untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing ada di tangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak diberikan kepada Pengadilan Negeri lain (Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1990). Hal ini berarti secara formal Pasal 195 dan Pasal 197 HIR telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk :

- a. Memerintahkan eksekusi putusan arbitrase asing,
- b. Memimpin jalannya eksekusi,
- c. Perintah eksekusi dituangkan dalam bentuk penetapan,
- d. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
- e. Fungsi kewenangan memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi mulai terlaksana :

- 1) Sejak mulai dilakukan tindakan *executorial beslag* (sita eksekutorial),
- 2) Pelaksanaan *executorial verkoop* (pelaksanaan pelelangan),
- 3) Sampai kepada penyelesaian tindakan pengosongan dan penyerahan secara riil barang yang dilelang kepada pihak pembeli.

Suatu keputusan arbitrase dilaksanakan melalui mekanisme pengadilan, dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, dan kewenangan bagi pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase asing harus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan melihat apakah keputusan arbitrase asing telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Eksekusi yang dilakukan terhadap putusan arbitrase asing adalah sita terhadap aset-aset, harta kekayaan serta barang-barang milik termohon eksekusi. Tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dan berlaku ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi dalam hukum acara perdata yang umum. Sehingga di Indonesia tata cara pelaksanaan eksekusinya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 Rbg.

Peranan pengadilan di Indonesia dalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing adalah untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal sampai kepada pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut. Di dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 terdapat beberapa hal tertentu dimana campur tangan pengadilan tersebut terhadap proses arbitrase dibatasi, misalnya :

- a. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase,

kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 11 ayat(2)).

- b. Dalam hal penunjukan arbiter oleh para pihak atau Ketua Pengadilan Negeri, maka Hakim, Jaksa, Panitra, dan Pejabat Pengadilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter (Pasal 12 ayat (2)).
- c. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase (Pasal 62 ayat (4)).

Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 peran pengadilan juga penting dalam hal penunjukkan arbiter atau majelis arbitrase :

- a. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).
- b. Dalam suatu arbitrase *ad-hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).

Masih terdapat lagi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase yang membatasi campur tangan pengadilan terhadap proses arbitrase. Dalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing, maka instansi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dianggap memiliki kemampuan untuk memeriksa dan membantu pelaksanaan keputusan arbitrase asing, serta Mahkamah Agung dalam hal salah satu pihak yang berperkara adalah Negara Republik Indonesia yang pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lembaga peradilan harus menghormati lembaga arbitrase,

karena lembaga arbitrase diberikan kewenangan yang luas dan tersendiri oleh negara tanpa campur tangan atau intervensi dari pengadilan negeri. Hal ini terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 :

- a. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- b. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Jadi, disini dapat dilihat bahwa lembaga arbitrase memiliki kewenangan tersendiri dalam membuat putusan arbitrase. Akan tetapi, peranan yang sangat besar juga dijalankan oleh pengadilan dalam menyaring agar keputusan lembaga arbitrase asing tersebut jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan, apalagi sampai merugikan kepentingan pembangunan nasional. Guna memperlancar pelaksanaan keputusan lembaga arbitrase asing yang telah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung, maka pengadilan juga akan membantu dalam hal pelaksanaannya di lapangan dengan perantaraan alat-alatnya, seperti juru sita, panitera dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan keputusan arbitrase asing dimaksud dapat berlangsung dengan lancar dan cepat. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan keputusan arbitrase asing dimaksud berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dilaksanakan di daerah), maka pelaksanaan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

Di bidang hukum proses strukturisasi dimulai dari kehadiran hukum modern. Disini hukum juga meninggalkan otentisitas alaminya untuk berubah menjadi institusi yang penuh dengan penataan secara

rasional, maka hukum menjadi independen dalam berbagai aspek dan melahirkan peraturan yang dibuat sendiri dengan sengaja. Sehingga, lembaga arbitrase adalah lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok. Setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract*-wan prestasi). Oleh karena itu, struktur penting untuk mendukung pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

Akan tetapi, karena kurangnya dukungan konstruktif dari pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase, menjadi hambatan utama bagi pihak yang dimenangkan dalam memperoleh kembali hak-haknya. Apabila keadaan itu terjadi dalam praktek, maka putusan arbitrase, dimanapun putusan tersebut dijatuhkan akan sulit untuk dieksekusi. Faktor lain yang juga sering menjadi kendala sulitnya putusan arbitrase untuk dieksekusi dapat juga berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal biasanya muncul dari keengganan pihak yang kalah dalam putusan arbitrase untuk menerima dan melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak ada itikad baik dari pihak yang kalah. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk melakukan eksekusi tersebut. Faktor tersebut biasanya berupa penolakan atau tidak diberikannya ijin eksekusi, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia

Pada dasarnya terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum karena putusan arbitrase bersifat *final and binding*, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum baik berupa, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). Putusan arbitrase asing di Indonesia didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu dapat diajukan upaya hukum tertentu. Upaya hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri menerima eksekusi.

Putusan Ketua Pengadilan Negeri yang menerima dan memerintahkan eksekusi putusan arbitrase bersifat *final and binding* sehingga terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

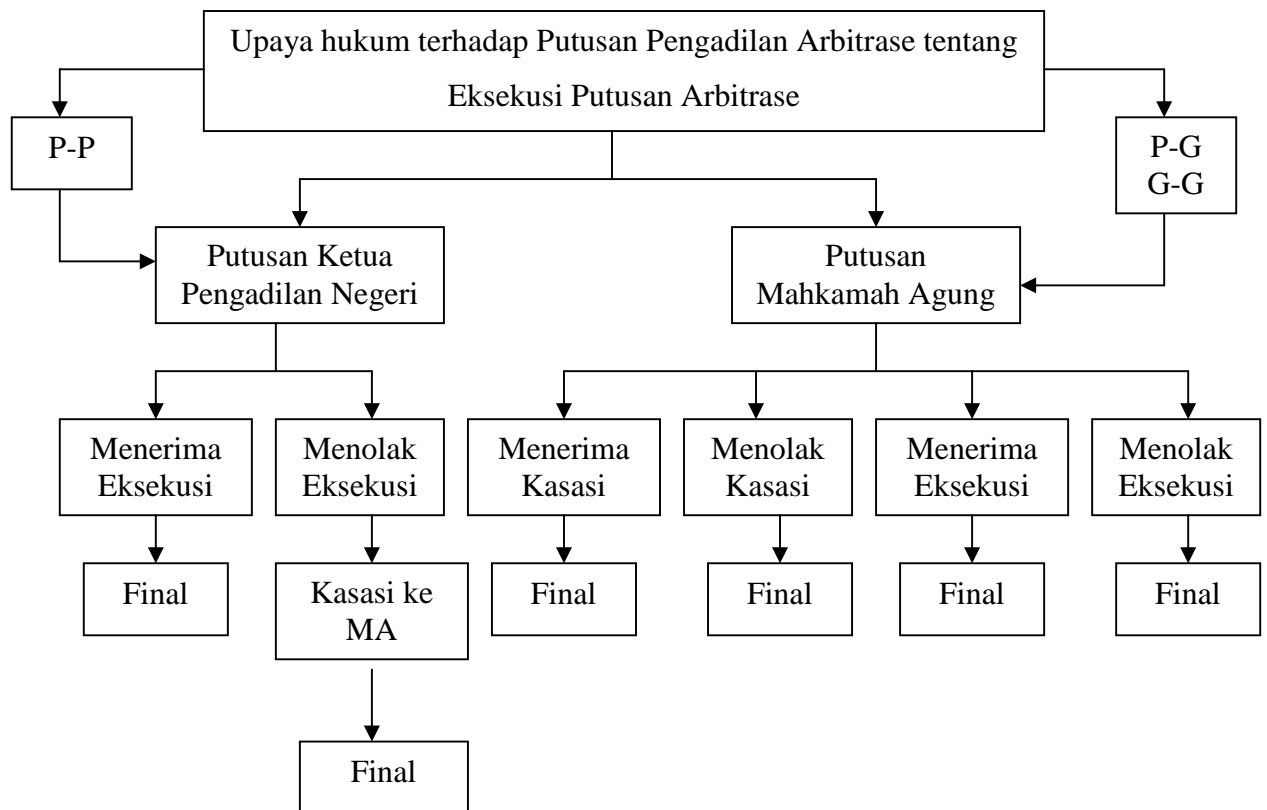
- b. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri menolak eksekusi.

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase asing masih tersedia upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus sudah memutuskan permohonan kasasi ini dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung ini sudah bersifat *final* tanpa ada upaya hukum apapun termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK).

- c. Terhadap putusan eksekutor Mahkamah Agung.

Terhadap putusan pelaksanaan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung (dalam hal negara terlibat sebagai salah satu pihak dalam sengketa tersebut), baik yang menerima atau yang menolak eksekusi, tidak tersedia upaya hukum apapun termasuk upaya perlawanan atau Peninjauan Kembali (PK).

Bagaimana upaya hukum terhadap putusan badan-badan pengadilan tentang eksekusi putusan arbitrase, dapat dilihat dalam diagram berikut :



Ket : P = Person/Individu
G = Government

Gambar 3. Upaya Hukum Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

Para pihak juga dapat mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap suatu putusan arbitrase asing dengan permohonan pembatalan dan penolakan terhadap putusan arbitrase asing tersebut.

a. Pembatalan Putusan Arbitrase Asing:

Proses dan alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinafikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase. Dalam proses pembatalan putusan arbitrase,

pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang dipersengketakan oleh para pihak. Kewenangan pengadilan hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa keabsahan dari segi prosedur pengambilan putusan arbitrase, diantaranya; proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

1) Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pembatalan putusan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal sebagai berikut (Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999) :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan diterima di pengadilan negeri Ketua Pengadilan Negeri sudah menetapkan putusannya. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan tersebut dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan tersebut merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

2) Pembatalan Putusan Menurut ICSID

Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General. Demikian penegasan Pasal 52 ayat (1) ICSID. Diberi hak kepada para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan atau *may request annulment of the award*.

Syarat formal pembatalan putusan yang diatur oleh ICSID menurut Pasal 52 adalah sebagai berikut :

a) Permohonan diajukan secara tertulis

Request annulment of the award by an application in writing. Permohonan permintaan pembatalan putusan diajukan secara tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) ICSID. Permohonan pembatalan yang diajukan secara lisan dianggap tidak memenuhi syarat formal. Dengan demikian permohonan tidak sah. Akibatnya permohonan tidak dapat diterima.

b) Permohonan dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal ICSID

Ketentuan ini perlu diingat, agar tidak timbul anggapan, permohonan disampaikan ke Pengadilan Negeri. Jika putusan arbitrase tersebut diambil di Indonesia, namun dasar-dasar penyelesaian dan putusan tunduk pada ICSID. Pemeriksaan dan penyelesaian pembatalan bukan menjadi fungsi dan kewenangan pengadilan negeri, tetapi menjadi kewenangan lembaga ICSID.

c) Dalam jangka waktu 120 hari setelah putusan diserahkan.

Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu 120 hari setelah putusan diserahkan. Apabila pembatalan diajukan melampaui batas tenggang waktu, tidak memenuhi syarat formal dan akibatnya permohonan tidak dapat diterima. Namun ada pengecualiannya, khusus untuk permohonan pembatalan

yang didasarkan atas alasan kecurangan atau *corruption* perhitungan batas tenggang waktu bukan 120 hari dari tanggal penerimaan putusan. Tetapi perhitungannya 120 hari dari tanggal ditemukan kecurangan (*application shall be made within 120 days after discovery of the corruption*) dan hal ini berlaku sampai batas tiga tahun sejak tanggal putusan diserahkan atau diterima para pihak.

Selain syarat formal, maka alasan permohonan pembatalan yang dibenarkan oleh ICSID, antara lain :

b) Pembentukan Mahkamah tidak tepat.

The tribunal was not properly constituted. Maksudnya, pembentukan Mahkamah Arbitrase yang memutus sengketa, tidak dilakukan menurut tata cara yang tepat. Pembentukannya mengandung pelanggaran ketentuan yang dibenarkan. Misalnya penunjukan arbiter yang duduk di dalam Mahkamah Arbitrase yang memutus sengketa, pertentangan dengan penggarisan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 37 sampai Pasal 40 ICSID. Oleh karena pembentukan mahkamah yang memutus sendiri tidak menurut ketentuan, dengan sendirinya putusan yang diambil tidak sah. Dengan demikian, layak untuk membatalkan putusan atas permintaan salah satu pihak.

Akan tetapi, selama tidak ada permintaan pembatalan meskipun pembentukan mahkamahannya tidak sah, putusan tetap dianggap sah. Keabsahan putusan tetap bertahan sampai ada permintaan permohonan pembatalan dari pihak yang berkepentingan.

c) Mahkamah melampaui batas kewenangan

Mahkamah Arbitrase dalam memutus sengketa bertindak *has manifestly exceeded its powers*. Dalam mengambil putusan atas sengketa nyata-nyata mahkamah

melampaui batas kewenangan (*the tribunal has manifestly exceeded its power*). Suatu putusan yang dianggap mengandung cacat melampaui batas kewenangan Mahkamah Arbitrase dapat diklasifikasi :

- (1) apabila telah diputus atau dikabulkan sesuatu hal yang sama sekali tidak dituntut dalam *claim* oleh pihak *claimant* maupun dalam atau *counter-claim* (*rekonvensi*) oleh pihak *respondent*.
- (2) apabila putusan telah mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dalam *claim* atau *counter-claim* (*ultra petita*).

Apabila putusan mengandung cacat yang seperti itu, memberi hak kepada para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan. Jika tidak diajukan permohonan pembatalan, putusan tetap dianggap sah, *final* dan *binding* kepada para pihak.

d) Salah seorang anggota arbiter korupsi

There was corruption on the part of a member of the Tribunal. Salah seorang anggota arbiter yang duduk dalam mahkamah yang memutus melakukan korupsi. Pengertian korupsi disini bisa berupa tindakan penyalahgunaan, kecurangan dan itikad jahat, sehingga putusannya dianggap mengandung cacat dan dapat diajukan sebagai alasan untuk meminta pembatalan putusan. Khusus untuk alasan korupsi, perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan ialah 120 hari dari tanggal perbuatan itu ditemukan dan tidak boleh melampaui batas waktu 3 tahun terhitung sejak putusan disampaikan kepada para pihak.

e) Penyimpangan yang serius tata cara pemeriksaan

Putusan mengandung penyimpangan yang serius dan fundamental dari ketentuan tata cara yang dibenarkan hukum.

There has been a serious departure from a fundamental rule of procedure (Pasal 52 ayat (2) huruf d). Yang dimaksud dengan putusan yang mengandung penyimpangan serius dan fundamental, apabila proses pemeriksaan melanggar ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan hukum.

f) Tidak cukup dasar pertimbangan putusan

That the award has failed to state the reason on which it is based. Mahkamah gagal atau tidak mampu mengungkapkan dan menjelaskan dasar-dasar alasan pertimbangan hukum dalam putusan. Motivasi pertimbangan tidak ada atau tidak cukup. Putusan hanya berisi aturan kesimpulan yang tidak jelas dasar alasannya darimana kesimpulan itu ditarik.

3) Pembatalan Putusan Menurut BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

BANI merupakan badan arbitrase umum di Indonesia. Namun, tidak berarti statu badan arbitrase nasional seperti BANI tidak dapat dipilih untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional. Biasanya, arbitrase nasional (seperti BANI) juga menyediakan diri untuk kasus-kasus yang bersifat internasional, khususnya jika salah satu pihak dalam sengketa tersebut adalah berasal dari negara dimana arbitrase nasional tersebut berada. Klausula arbitrase sebagaimana yang disarankan oleh BANI isinya adalah sebagai berikut : Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Di dalam peraturan prosedur BANI tidak menyinggung masalah pembatalan putusan. Putusan BANI bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadapnya.

4) Pembatalan Putusan Menurut UNCITRAL

UNCITRAL tidak mengenal adanya upaya pembatalan putusan. Di dalam Pasal 32 ayat (2) menegaskan putusan langsung bersifat *final* dan *binding*. Tidak adanya upaya pembatalan putusan, tampaknya telah diimbangi dengan berbagai upaya lain dalam bentuk upaya *interpretation of the award*, *correction of the award* maupun upaya *additional award*. Upaya-upaya ini telah mengganti fungsi pembatalan putusan. Apalagi jika upaya-upaya dimaksud dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 yang mengatur tentang *pleas as to the jurisdiction of the arbitral tribunal*. Karena melalui ketentuan ini, pada saat proses pemeriksaan berlangsung, para pihak sudah dapat mengoreksi cacat-cacat yang berkenaan dengan masalah yurisdiksi Mahkamah Arbitrase, juga sudah dapat meminta perbaikan agar pemeriksaan dilakukan sesuai dengan batas-batas perjanjian. Sedangkan mengenai perbaikan penjelasan dan penambahan atau pengurangan yang mungkin terkandung sebagai cacat dalam putusan, dapat diluruskan melalui upaya *interpretation*, *correction* maupun upaya *additional award*, yang meliputi :

- a) Penambahan putusan,
- b) Ralat putusan,
- c) Pengurangan putusan.

Sedangkan *additional award* merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dapat mengubah dan merombak putusan arbitrase semula menjadi seolah-olah putusan baru yang telah diluruskan cacat kekeliruannya.

b. Penolakan Putusan Arbitrase Asing

Ada dua alasan mengapa pengadilan tidak mengabulkan pelaksanaan putusan arbitrase asing di suatu negara. Pertama, putusan tersebut bertentangan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal V

(1) *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau Konvensi New York tahun 1958. Pasal V ayat (1) Konvesi 1958 menegaskan penolakan eksekusi bisa dilakukan jika terbukti para pihak tidak berwenang membuat perjanjian arbitrase. Alasan penolakan lain adalah pemberitahuan yang tidak lazim tentang akan atau sedang berlangsungnya proses arbitrase kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, eksekusi bisa ditolak jika arbiter telah melampaui kewenangan, komposisi arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kontrak dan putusan aritrase belum mengikat.

Kedua, bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau ketertiban umum dari pengadilan yang diminta untuk melaksanakan putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal V ayat (2), yaitu jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitase yang dimohonkan menemukan pokok persengketaan tidak dapat diselesaikan melalui arbitase di negara itu. Selain itu, penolakan bisa dilakukan jika pengakuan atau pelaksanaan putusan itu bertentangan dengan kepentingan negara itu.

Penolakan putusan arbitrase asing mendapat pengaturan dalam perjanjian internasional yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Dalam perjanjian internasional dikenal adanya kedaulatan dan yurisdiksi. Pelaksanaan yurisdiksi kekuasaan negara hanya dapat dilakukan di wilayah teritorialnya dan pelaksanaan yurisdiksi suatu negara di negara lain harus seijin negara lain tersebut. Putusan arbitrase yang dibuat suatu negara dan hendak dilaksanakan di negara lain harus mendapat pengakuan dan pelaksanaan oleh negara lain tersebut. Perjanjian internasional yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (Konvensi New York 1958).

Prinsipnya yaitu bahwa pihak yang mengajukan penolakan keputusan arbitrase harus mengajukan dan membuktikan alasan-alasan penolakan keputusan arbitrase, yaitu :

- 1) Bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut ternyata menurut hukum nasionalnya tidak mampu atau menurut hukum yang mengatur perjanjian tersebut atau menurut hukum negara dimana keputusan tersebut dibuat apabila tidak ada petunjuk hukum mana yang berlaku,
- 2) Pihak terhadap mana keputusan diminta tidak diberikan pemberitahuan yang sepatutnya tentang penunjukan arbitrator atau persidangan arbitrase atau tidak dapat mengajukan kasusnya,
- 3) Keputusan yang dikeluarkan tidak menyangkut hal-hal yang diserahkan untuk diputuskan oleh arbitrase atau keputusan tersebut mengandung hal-hal yang berada di luar hal-hal yang seharusnya diputuskan,
- 4) Komposisi wewenang arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan persetujuan para pihak atau tidak sesuai dengan hukum nasional tempat arbitrase berlangsung,
- 5) Keputusan tersebut belum mengikat terhadap para pihak atau dikesampingkan atau ditanggguhkan oleh pejabat yang berwenang di negara dimana keputusan dibuat.

Penolakan putusan arbitrase oleh pengadilan tidak berarti menafikan (seolah tidak pernah dibuat) putusan tersebut. Penolakan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase asing dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya.

4. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing

Apabila ditelusuri keseluruhan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 maupun PERMA. Nomor 1 Tahun 1990, dan beberapa ketentuan yang memuat

ratifikasi konvensi pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, nampaknya pemerintah bersungguh-sungguh untuk memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa guna melaksanakan keputusan arbitrase asing yang eksekusinya akan dilaksanakan di Indonesia. Di bidang hukum proses strukturisasi dimulai dari kehadiran hukum modern. Hukum adalah lembaga yang melakukan pengaturan masyarakat dan karena itu berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat. Mengatur tidak untuk sendiri, melainkan berinteraksi dengan masyarakat dan perilaku anggota masyarakat. Di Indonesia sendiri aturan mengenai arbitrase sudah diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Namun ketentuan yang baik tersebut belum tentu dapat direalisasikan secara sempurna dalam praktek, sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kondisi hukum di Indonesia maupun persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara dimana keputusan tersebut ditetapkan. Sehingga pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia masih banyak memiliki hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

a. Peranan lembaga peradilan formal yang masih sangat dominan

Di Indonesia lembaga peradilan formal masih sangat besar pengaruhnya, dimana eksekusi keputusan lembaga arbitrase asing harus melalui pengadilan negeri. Eksekusi keputusan lembaga arbitrase asing yang harus melalui pengadilan negeri sering kali menjadi suatu masalah yang menakutkan bagi pihak pemenang, karena disini akan mulai ditemukan lagi kesulitan dari pengajuan perkara melalui saluran pengadilan negeri. Dimana untuk memulai eksekusi harus dimulai dengan dilakukannya peneguran, dan setelah 8 hari peneguran ini seharusnya ditindak lanjuti dengan sitaan dan kemudian lelang dihadapan kantor lelang setempat dari aset pihak yang dikalahkan.

Tetapi, disini timbul kemungkinan untuk masuknya berbagai pihak, baik pihak yang harus melaksanakan eksekusi maupun pihak

ketiga yang mempunyai kepentingan dan dapat menyanggah segala sesuatu yang telah didasarkan atas putusan eksekusi ini. Misalnya, barang-barang yang telah disita dan hendak dilelang tersebut bukan barang-barang dari pihak yang dieksekusi, atau sitaan yang telah dilakukan dalam rangka eksekusi ini adalah keliru, dan diletakkan atas barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan si pemilik.

Jadi, ada bermacam-macam keberatan yang bisa diajukan dari berbagai pihak untuk memperlambat dilaksanakannya eksekusi terhadap pihak yang kalah. Kemudian, timbul kekhawatiran bahwa pengadilan negeri yang tersebar di seluruh Indonesia masih belum cakap untuk melaksanakan putusan arbitrase asing ini, yang akan dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya.

b. Kompetensi Pengadilan

Pengadilan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing, menurut Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi, masih ada pihak-pihak yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase dalam hal penyelesaian sengketa masih mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi sengketa. Sebenarnya, pengadilan disini hanya berperan dalam hal pendaftaran, pelaksanaan dan upaya hukum putusan arbitrase asing.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar peradilan di Indonesia dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun kenyataannya perkara di pengadilan bisa memakan waktu yang sangat lama karena prosesnya sangat panjang (banding, kasasi, PK) dan menumpuknya perkara di tingkat banding dan kasasi. Akibatnya biaya perkara menjadi sangat tinggi. Proses penyelesaian yang berlarut-larut dan mahal menimbulkan risiko bagi masyarakat karena ada

inefisiensi waktu dan biaya serta ada sebagian usaha/kegiatan menjadi terhalang untuk dikerjakan hingga kasusnya selesai.

Di samping itu, proses beracara di pengadilan terasa sangat kompleks dan kaku. Keadaan tersebut mengakibatkan keterbatasan pengadilan memberikan layanan keadilan kepada masyarakat. Akses masyarakat kepada keadilan menjadi semakin jauh, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil tapi juga bagi hampir semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, arbitrase semakin berkembang tidak hanya karena secara konsep mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pengadilan, tidak hanya karena secara praktek sudah terbukti menjadi solusi yang dapat diterima, dan tidak hanya karena pengadilan serta keadilan semakin susah dijangkau. Perkembangan itu memunculkan urgensi untuk mengoptimalkan arbitrase sebagai alternatif selain menyelesaikan sengketa ke pengadilan yang dapat lebih melindungi kepentingan masyarakat sehingga akses masyarakat kepada keadilan tetap dapat terjamin.

c. Adanya perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia (Asas Timbal Balik)

Hal ini merupakan salah satu syarat agar putusan arbitrase asing dapat diakui atau dilaksanakan di wilayah Indonesia. Sehingga mengharuskan negara tempat keputusan arbitrase asing tersebut ditetapkan telah menandatangani perjanjian bilateral dengan Negara Republik Indonesia tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, atau telah turut pula meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, misalnya Konvensi New York 1958 dimana Indonesia telah meratifikasinya dengan Kepres Nomor 34 Tahun 1981.

Hal ini berkaitan dengan “Asas Timbal balik” yang dikenal dalam Hukum Internasional, dimana tindakan-tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain akan memperoleh balasan yang serupa dari negara lain secara bertimbal balik. Oleh karena itu, apabila Indonesia mengakui dan melaksanakan keputusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase asing di suatu negara, maka Indonesia juga mengharapkan keputusan yang dijatuhkan lembaga arbitrase Indonesia akan memperoleh pengakuan dan dapat dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan. Sehingga bagi negara-negara yang belum membuat perjanjian bilateral dengan Indonesia atau belum meratifikasi konvensi-konvensi yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengakuan keputusan arbitrase asing, maka permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase asing yang dijatuhkan di negara tersebut akan ditolak pelaksanaannya di Indonesia.

d. Tumpang tindih peraturan

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dibandingkan dengan pengaturan Ketentuan-ketentuan Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Perdagangan Internasional (*The United Nations Commission on International Trade Law*) atau lebih dikenal Arbitrase Model Law UNCITRAL 1985 yang terdiri dari 36 pasal, UU Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang terdiri dari 82 pasal tersebut telah secara luas mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase. Banyaknya pasal tersebut tampaknya agar UU Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mampu mengakomodasikan banyak hal dengan mengaturnya secara mendetail (meskipun seharusnya hal itu bukan muatan suatu undang-undang), misalnya, keharusan bagi sekretaris untuk membuat notulen rapat sehubungan dengan kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase.

Selain itu, Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional. Upaya memasukkan semua aspek arbitrase ke dalam satu undang-undang arbitrase nasional dapat mendatangkan banyak persoalan dan membingungkan, baik mengenai letak pengaturannya maupun materinya. Tentang letak pengaturan, misalnya tentang “prinsip pembatasan intervensi pengadilan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Ayat (2) tersebut tidak berhubungan dengan ayat lainnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) yang mengatur mengenai “perjanjian arbitrase”, serta diletakkan pada bab yang tidak ada kaitannya, yaitu Bab III tentang syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, dan hak ingkar. Dalam Model Law, prinsip ini (*limited court involvement*) diletakkan pada bagian Ketentuan Umum (*General Provisions*).

Materi Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 juga menimbulkan persoalan, misalnya tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu bagi pendaftaran putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengaturan mengenai periode waktu itu sangat penting karena putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan.

Di samping itu, masih banyak masalah lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, Setelah diratifikasinya Konvensi Jenewa 1927 dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda dengan Stbl. 1933 No. 131, maka sejak itu untuk putusan hakim arbitrase asing telah dapat dilaksanakan di Hindia Belanda. Namun setelah pengakuan kedaulatan

RI, banyak kontroversi yang terjadi mengenai apakah masih berlakunya Konvensi Jenewa 1927 tersebut untuk Indonesia karena telah dinyatakan batalnya Konverensi Meja Bundar yang di dalamnya dinyatakan konvensi-konvensi yang tadinya oleh Nedtherland telah dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda apabila Republik Indonesia tidak menyatakan secara tegas tidak menghendaki lagi keterikatannya pada konvensi-konvensi yang bersangkutan. Tapi jika ditinjau dari Ketentuan dalam aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 juga dalam Peraturan Peralihan No II tahun 1945 maka segala perundangan dari pemerintah Hindia Belanda yang belum diganti dianggap sebagai masih berlaku dan merupakan peraturan tersendiri dari Republik Indonesia.

Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bagaimana jika suatu putusan arbitrase internasional dieksekusi di Indonesia, di mana beberapa ketentuan pokok pengaturan oleh Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang berhubungan dengan eksekusi terhadap suatu putusan dari arbitrase Dikeluarkannya Keppres Nomor 34 tahun 1981 yang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau yang dikenal dengan *New York Convention* 1958, merupakan penyesuaian terhadap aturan mengenai pengakuan Keputusan Arbitrase Asing yang telah berlaku secara Internasional menggantikan Konvensi Jenewa 1927 yang telah dianggap tidak sesuai.

e. Tidak ada keinginan secara sukarela untuk melaksanakan putusan arbitrase asing dari pihak yang kalah

Pihak yang kalah dalam putusan arbitrase asing tidak menerima dan melaksanakan putusan secara sukarela. Padahal putusan arbitrase asing bersifat *final* dan *binding*. Putusan arbitrase juga bersifat *win-lose solution* yang diminimalisir. Jadi, salah satu pihak pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Sehingga, para pihak mau tidak mau

harus melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Bagi pihak yang dimenangkan dalam putusan arbitrase, dapat dieksekusinya putusan arbitrase oleh pengadilan yang memiliki kompetensi merupakan realisasi atas jaminan kepastian hukum dalam menuntut kembali hak-haknya dari pihak lain.

f. Bertentangan dengan ketertiban umum

Putusan Arbitrase asing yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya terganjal dalam masalah eksekusinya atau pelaksanaannya yang tidak memenuhi syarat dapat dilaksanakannya putusan arbitrase asing di Indonesia. Putusan arbitrase yang tidak dapat dieksekusi dikarenakan alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase.

Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi dan nilai-nilai asasi dari hukum dan kepentingan nasional suatu negara. Pada suatu ketika ketertiban umum dapat diartikan sebagai “tata tertib” kehidupan suatu masyarakat yang meliputi kehidupan kesadaran hukum, moral dan agama. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai nilai yang berkaitan dengan budaya dan rasa kepatutan dan keadilan suatu bangsa.

Undang-Undang Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum karena hal tersebut merupakan keputusan dari pengadilan dan akan diputuskan secara kasus per kasus. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing akan bergantung pada bagaimana pengadilan Indonesia melihat setiap permintaan. Pengadilan akan menentukan mana putusan arbitrase asing yang akan diakui atau dilaksanakan di Indonesia dan mana putusan yang akan

ditolak pengakuan dan pelaksanaannya, namun untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase asing bertentangan dengan ketertiban umum dapat digunakan kriteria sebagai berikut (Ade Didik Irawan, penyelesaian alternatif sengketa hukum dagang, [http://www.mypulau.com/adedidikirawan/blog/\(diakses](http://www.mypulau.com/adedidikirawan/blog/(diakses) tanggal 27 Juli 2009)):

- 1) Putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan ;
- 2) Putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
- 3) Jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.
- 4) Ketertiban umum juga dikaitkan dengan apakah perjanjian dibuat dengan paksaan atau tidak.

Asas ketertiban umum merupakan asas fundamen dalam Konvensi New York 1958. Asas tersebut ditegaskan dalam Pasal V ayat (2) huruf b yang berbunyi “*the recognition or enforcement of the award would be contrary of the public policy of that country*” . Oleh karena ketertiban umum sebagai salah satu asas dalam Konvensi, memberi kewenangan bagi negara yang diminta eksekusi, untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan apabila putusan bertentangan dengan kepentingan umum negara yang bersangkutan.

Kepentingan umum atau ketertiban umum, itu sendiri mengandung batasan yang sangat luas, multitafsir dan dapat berubah menurut waktu dan tempat. Ketertiban umum juga ada yang bermakna internal (*internal public order*) dan ada juga yang menyangkut *international order*. Ketertiban umum internal adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan sedangkan

ketertiban umum eksternal adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam pengertian seluruhnya. Namun dalam implementasinya, hal ini tidak terlalu mudah dibedakan. Setiap negara memiliki aturan, kaidah dan ukuran ketertiban umumnya sendiri.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, namun dengan adanya perundang-undangan tersebut tidak serta merta keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Mahkamah berpendapat, perlu adanya peraturan pelaksana dari Keppres tersebut agar pelaksanaan (eksekusi) suatu keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan. Lengkapnya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya mengenai Keppres No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* sesuai praktek hukum yang masih berlaku harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri yang dimana ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum Indonesia bahwa berdasarkan hal-hal yang uraian di atas, permohonan pelaksanaan Hakim Arbitrase asing seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Huala Adolf, 2002:120).

Keputusan arbitrase asing yang bertentangan dengan ketertiban umum dapat dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan arbitrase tersebut hanya bersifat titel eksekutor saja, yang belum merupakan perintah (*prima facie*). Sedangkan pelaksanaan menurut Majelis Arbitrase, tetap harus tunduk pada hukum acara Indonesia. Alasan kepentingan umum dapat dipakai sebagai alasan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase (Huala Adolf, 2002:127).

Lembaga ketertiban umum ini seyogyanya hanya dipakai sebagai tameng dan tidak sebagai suatu pedang untuk menusuk hukum asing. Dengan kata lain, fungsinya hanya defensif, hanya sebagai perlindungan dan bukan meniadakan pemakaian hukum asing (Sudargo Gautama, 2004:134). Dengan demikian lembaga ketertiban umum di satu sisi dapat memberikan perlindungan hukum bagi suatu negara dari putusan arbitrase asing yang mungkin merugikan kepentingan negara yang bersangkutan, akan tetapi di sisi lain seringkali bisa dijadikan alat bagi negara yang dikalahkan untuk secara sengaja mencegah putusan arbitrase internasional tersebut walaupun secara material pada dasarnya putusan dimaksud dapat dilaksanakan.

5. Putusan Arbitrase Asing Yang Digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

a. Kasus Karaha Bodas *Company* (KBC) dengan Pertamina

Masalah KBC bermula dengan adanya niat Pertamina dan KBC untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang berasal dari panas bumi (geothermal). Niat ini dituangkan kedua belah pihak dalam *Joint Operation Contract* (JOC). Tenaga listrik yang dihasilkan rencananya akan dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) berdasarkan *Energy Sales Contract* (ESC). Proyek ini mengalami persoalan saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997. Pada waktu itu berdasarkan keputusan presiden (keppres) Nomor 5 Tahun 1998, pemerintah memutuskan membatalkan proyek Karaha Bodas. Pada tahun 1999 proyek yang terbengkalai mulai dimasalahkan KBC.

KBC yang tidak mempercayai pengadilan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya dengan Pertamina, dan karena itulah klausul arbitrasenya memilih arbitrase internasional. Ini adalah pilihan kontraktual yang seharusnya dihormati dan, karenanya, siapa pun yang memilih arbitrase jangan menganggap remeh apalagi mengabaikan proses arbitrase itu. Konon, Pertamina agak mengabaikan proses

arbitrase tersebut karena terlambat menunjuk arbitrator sehingga penunjukan arbitrator itu dilakukan oleh lembaga arbitrase internasional tersebut. Dalam perjalanannya, mungkin Pertamina tak sepenuhnya siap dalam pertarungan arbitrase tersebut. Padahal sebetulnya Pertamina mempunyai alasan yang cukup kuat untuk memenangkan arbitrase, setidaknya untuk mendapatkan putusan yang sifatnya *win-win*. Penghentian proyek pengembangan listrik tenaga panas bumi di Karaha Bodas tahun 1997 merupakan *force majeure* akibat krisis ekonomi di kawasan ini. Andainya Pertamina salah, kesalahan itu tak dapat ditimpakan seratus persen ke pundak Pertamina. Seharusnya Pertamina bisa datang dengan argumentasi dan bukti-bukti sangat kuat dan meyakinkan.

Pertamina dan PLN dianggap tidak serius melakukan lobi kepada pemerintah agar proyek dapat dihidupkan kembali. Oleh KBC, ini dianggap sebagai sebuah cedera janji. Proses hukum pun dimulai dalam bentuk gugatan ganti rugi yang diajukan ke sebuah arbitrase *ad hoc* di Genewa, Swiss, sebagaimana ditentukan oleh para pihak dalam JOC dan ESC. Pada saat perkara mulai diperiksa, sebenarnya Pertamina memiliki peluang terhindar dari pembayaran ganti rugi. Sayang, peluang tidak dimanfaatkan maksimal. Para arbiter menjatuhkan vonis yang tidak menguntungkan Pertamina dan PLN. Pertamina dan PLN harus membayar ganti rugi 261 juta dollar Amerika Serikat (AS). Meski telah ada vonis, Pertamina dan PLN masih memiliki upaya hukum, yaitu pembatalan putusan arbitrase yang telah dibuat. Upaya hukum pembatalan tidak sama dengan upaya hukum banding karena yang dipermasalahkan adalah hal-hal yang ada di luar pokok sengketa. Sebagai contoh pembatalan bisa dilakukan jika para arbiter dalam membuat putusan tidak menggunakan hukum yang telah disepakati para pihak; atau arbiter telah membuat putusan yang melebihi apa yang diminta pihak-pihak yang bersengketa. Kesempatan

ini pun tidak dimanfaatkan oleh Pertamina.

KBC menuntut ganti rugi US\$ 613 juta dan hanya mendapatkan US\$ 261 juta. Jumlah ini tidak kecil, apalagi sekarang angkanya sudah membesar menjadi US\$ 294 juta. Tetapi, pihak Pertamina justru bukannya mencari jalan keluar atau *amicable settlement* dengan pihak KBC. Putusan arbitrase itu diupayakan untuk dibatalkan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Todung Mulya Lubis, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2004/08/02/KL/mbm.20040802.KL94260.id.html> (diakses tanggal 1 Maret 2009 pukul 10.00)).

Saat itu Pertamina bukannya meminta pengadilan Swiss membatalkan putusan arbitrase, tetapi yang diminta membatalkan pengadilan Indonesia. Pengadilan Swiss adalah pengadilan yang berwenang membatalkan karena putusan arbitrase diterbitkan di Swiss. Sementara itu, KBC selaku pihak yang "diuntungkan" dengan putusan arbitrase menindaklanjuti putusan itu dengan minta eksekusi. Eksekusi adalah suatu pemaksaan oleh negara (yang dalam proses perdata dilakukan oleh pengadilan) agar pihak yang dikalahkan mau mematuhi putusan pengadilan atau arbitrase. Proses eksekusi merupakan proses yang terlepas dari mau tidaknya pihak yang dikalahkan untuk menjalankan putusan. Adalah suatu pernyataan yang menyesatkan bila eksekusi dikaitkan kemauan Pertamina atau pemerintah (sebagai pemegang saham) untuk tunduk pada putusan arbitrase. Proses eksekusi yang diminta KBC dilakukan di luar Indonesia, seperti AS, Singapura, dan Hongkong. Ini dilakukan karena KBC menyadari kompleksitas yang dihadapi bila eksekusi diminta di Indonesia. Tindakan KBC secara hukum merupakan tindakan yang sah-sah saja mengingat di tiga negara yang disebutkan terdapat aset Pertamina.

Selain itu, ketiga negara, sebagaimana Swiss, telah meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (New York Convention 1958). Untuk merespons tindakan KBC, Pertamina melakukan upaya hukum berupa permohonan kepada pengadilan agar menolak eksekusi putusan arbitrase. Dasar dari permohonan adalah Pertamina sedang melakukan upaya hukum pembatalan atas putusan arbitrase. Dasar ini dibenarkan oleh New York Convention 1958.

Memang, upaya hukum pembatalan atas putusan arbitrase berhasil dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sayang, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap tidak mempunyai makna di mata pengadilan AS. Alasannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap bukan pengadilan yang berwenang (*competent authority*) untuk membatalkan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam New York Convention 1958.

b. Kasus *Bankers Trust Company, Bankers Trust International* dan PT. BT. Prima Securities Indonesia dengan PT. Mayora Indah Tbk

Dalam kasus *Bankers Trust Company* dan *Bankers Trust International PLC* (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02 /Pdt.P /2000 /PNJKT. PST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02K/Ex'r/Arb.Int /Pdt

/2000, tanggal 5 September 2000.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksanya karena ada perjanjian arbitrasenya. Para pihak dapat mengajukan sengketa ke lembaga arbitrase yang sudah ditunjuk dalam perjanjian tersebut. Keputusan yang dihasilkan adalah putusan yang *final and binding*. Putusan tersebut harus dilaksanakan menurut hukum acara yang berlaku dalam wilayah negara dimana putusan arbitrase yang bersangkutan dimohon eksekusi. Sedangkan untuk mendaftarkannya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri setempat untuk arbitrase nasional dan untuk arbitrase asing di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing, diberi wewenang untuk menanganinya sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 66 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, terhadap permohonan eksekusi dari Putusan Arbitrase London yang telah dideponir di kepaniteraan PN Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 1999. Pihak pemohon adalah *Bankers Trust Company, Bankers Trust International* dan PT. BT. Prima Securities Indonesia. Pihak termohon adalah PT. Mayora Indah Tbk. Karena penolakan permohonan eksekutor tersebut maka Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 14 Maret 2000 tapi sampai batas waktu yang ditentukan Undang-Undang untuk jangka waktu penyelesaian perkara sampai 90 hari tidak dapat dipenuhi, sehingga mengulur waktu lebih lama sampai berbulan-bulan sejak pengajuan kasasi dan baru ada keputusan pada tanggal 5 September 2000 yang menyatakan menolak permohonan kasasi. Karena alasan putusan telah melanggar ketertiban umum.

c. Kasus Pertamina dan Pertamina EP dengan PT. Lirik Petroleum

PT. Lirik Petroleum adalah mitra Pertamina dalam pengelolaan lapangan Lirik lewat mekanisme badan operasi bersama atau join operating body (JOB) pada tahun 1995. Kasus ini berawal pada tahun 1995-1996 yang pada waktu itu Pertamina, selain bertindak sebagai “pemain”, juga sebagai Regulator (yang setelah keluarnya UU 20/2001 tentang Migas hingga saat ini dilakukan oleh BP Migas). Pada saat itu PT. Lirik Petroleum mengajukan rencana pengembangan (*Plan of Development/POD*) kepada Pertamina terhadap 4 lapangan minyak, yaitu North Pulai, South Pulai, Molek, dan Lirik. Dari keempat lapangan minyak tersebut, hanya Lirik yang menurut penilaian Pertamina komersial. Penentuan komersialitas ini perlu karena nantinya Pemerintah yang akan membayar *cost recovery* terhadap PT. Lirik Petroleum. Merasa dirugikan, PT. Lirik Petroleum mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian karena hanya satu lapangan minyak yang disetujui oleh Pertamina ke arbitrase ICC di Paris, Perancis.

Pemilihan ICC sebagai forum penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Proses pelaksanaan arbitrase pertama dan kedua dilaksanakan di Jakarta, dan yang ketiga dan selanjutnya dilaksanakan secara teleconference dan putusan arbitrasenya sendiri dilaksanakan oleh ICC yang berkedudukan di Paris. Arbitrase ICC telah membacakan *partial award* tertanggal 22 September 2008 dan *final award* tertanggal 27 Februari 2009 dalam perkara antara PT Lirik Petroleum dan PT Pertamina dan Pertamina EP. Dalam final award majelis arbitrase memutuskan, memerintahkan, dan menetapkan antara lain PT Pertamina dan Pertamina EP diwajibkan membayar ganti rugi total US\$34.495.428 kepada PT Lirik Petroleum.

Jumlah itu terdiri dari US\$34.172.178 sebagai ganti rugi atas pelanggaran terhadap *Enhanced Oil Recovery Contract*, US\$25.311.940 untuk masalah ditolakny komersialitas atas 3 lapangan minyak yang lain, US\$8.722.569 untuk masalah kegagalan jalur pipa, dan US\$137.669 untuk masalah klaim dalam membayar, serta US\$323.250 untuk biaya yang dikeluarkan PT Lirik Petroleum dalam proses arbitrase. Pada tanggal 21 April 2009, atau hari ke 53 setelah putusan dibacakan, PT. Lirik Petroleum kemudian, melalui kuasa hukumnya, mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan. Di pihak lain, yaitu Pertamina dan Pertamina EP, pada tanggal 11 Mei 2009 mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Pengajuan pembatalan putusan arbitrase dilakukan atas dasar putusan arbitrase itu bertentangan dengan ketertiban umum, melanggar asas ultra petita, mengandung cacat kontroversi, serta melanggar Pasal 59 (1) huruf a UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

d. Kasus Amco Asia Corporation dengan Republic of Indonesia

Kasus bermula dari Kartika Plaza, hotel berbintang empat dan berkamar 370 buah milik PT Wisma Kartika, anak perusahaan Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad). Pada 1968, Wisma Kartika menandatangani kerja sama dengan Amco Asia, dan melahirkan Amco Indonesia. Waktu itu, Amco Asia setuju membangun Kartika Plaza dengan modal US\$ 4 juta. Kemudian kedua pihak membuat perjanjian pembagian keuntungan dan kontrak manajemen Kartika Plaza. Amco Indonesia akan mengelola hotel itu dan menyetorkan separuh keuntungan kepada Wisma Kartika. Tapi kerja sama itu, yang mestinya berakhir pada 1999, retak di tengah jalan. Kedua pihak bertikai soal keuntungan dan modal yang harus disetor.

Puncaknya, pada Maret 1980, Wisma Kartika mengambil alih pengelolaan Kartika Plaza. Amco Indonesia dinilai pimpinan Wisma Kartika telah "salah urus" dan melakukan kecurangan keuangan. Tentu saja, Amco Indonesia tak bisa menerima "kudeta" itu. Perusahaan tersebut mengaku sudah menanam dana untuk Kartika Plaza hampir US\$ 5 juta. Kecuali itu, Amco Indonesia juga menyatakan bahwa mereka, sejak 1969, telah menyetorkan keuntungan kepada Wisma Kartika sebanyak Rp 400 juta. Begitu pula pembagian keuntungan untuk Wisma Kartika pada 1979, sebesar Rp 35 juta, sudah dibayarkan. Pada Juli 1980, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin usaha Amco Indonesia. Karena mereka dinilai tidak memenuhi kewajiban permodalan. Perusahaan itu, yang seharusnya menanam modal US\$ 4 juta, kenyataannya cuma menyetor sekitar US\$ 1,4 juta. Buntut dari pengambilalihan pengelolaan Kartika Plaza itu akhirnya dimajukan ke meja hijau. Wisma Kartika menggugat Amco Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampai tingkat kasasi (30 April 1985), Amco Indonesia masih tetap kalah, dan diharuskan membayar ganti rugi hampir Rp 800 juta. Pelaksanaan ganti rugi tersebut dikabarkan belum sampai dilaksanakan, karena Amco Indonesia, waktu itu, disebut-sebut sudah bubar. Pada 15 Januari 1981, Amco Indonesia ternyata menggelar perkara itu di lembaga arbitrase ICSID.

Mereka menuntut pemerintah RI membayar ganti rugi US\$ 12 juta, berdasarkan kurs masa itu sekitar Rp 15 milyar. Setelah hampir tiga tahun di persidangan, dewan arbiter akhirnya menghukum Indonesia untuk membayar ganti rugi US\$ 3,2 juta pada 19 November 1984. Pemerintah Indonesia, menyatakan banding atas keputusan dewan arbiter tersebut. Pada 16 Mei 1986 keputusan membayar ganti rugi kepada Amco Indonesia itu dibatalkan pengadilan. Kendati demikian, pemerintah RI dalam hal ini diwakili Departemen Keuangan

konon sudah telanjur mengeluarkan biaya sekitar US\$ 4 juta untuk meladeni arbitrase itu. Uang tersebut antara lain untuk ongkos arbiter, para saksi, dan biaya persidangannya, yang berpindah-pindah dari Washington, Paris, Kopenhagen, dan Wina. Merasa dirugikan oleh keputusan itu, Amco Indonesia kembali menggelar gugatan di ICSID.

Pada 31 Mei 1990, majelis arbiter menghukum Indonesia untuk membayar ganti rugi US\$ 2,6 juta plus bunga 6% per tahun terhitung sejak keputusan dewan arbiter diucapkan. Menurut pengacara kantor pusat Amco di New York, Robert Hornick, pemerintah Indonesia sepatutnya menaati keputusan itu. Sebab, tambahanya, selain pihaknya sudah menunggu lama sekali, ganti rugi itu juga praktis lebih kecil ketimbang keputusan pertama ICSID. Tan Tjin Kan, kelahiran Indonesia, pemerintah RI sebagai anggota Bank Dunia selayaknya menghormati keputusan itu. Ia menambahkan bahwa Amco kecewa dengan ganti rugi yang ditetapkan dewan arbitrase. Karena ongkos yang mereka keluarkan untuk kasus itu sebesar US\$ 1,5 juta.

Kasus sengketa antara Pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa Pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri, dimana Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti AMCO Asia Corporation, Pan America Development dan PT. Amco Indonesia.

Dalam tingkat kedua yang merupakan putusan panitia adhoc ICSID sebagai akibat dari permohonan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan putusan (*annulment*) tingkat pertama yang berisikan

bahwa Pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan tingkat pertama, namun Pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (*illegal selfhelp*) terhadap penanaman modal asing. Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar US \$ 3.200.000 pada tingkat pertama.

Ketiga badan hukum tersebut diatas, telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase ICSID bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak wajar sehubungan dengan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia c.q BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

e. Kasus ConocoPhilips dengan PT Sapta Sarana Personaprima

Awalnya, ConocoPhilips dan PT Sapta Sarana Personaprima bersepakat melakukan kerja sama dalam penyediaan rig untuk proyek pengeboran minyak dan gas bumi pada ladang minyak di Corridor Block, sebelah barat laut kota Palembang. Kedua perusahaan kemudian menandatangani kontrak Rig Management Services pada 1 Agustus 2001. Sesuai dengan Amendemen No.1 Rig Management Services, disepakati bahwa tanggal permulaan operasional kerja Sapta berlaku mulai 24 Oktober 2001. Dalam klausul kontrak, Sapta berkewajiban mendatangkan rig untuk pengeboran minyak dan gas bumi dan mengoperasikannya untuk kepentingan eksploitasi Conoco.

Pada pelaksanaannya, telah terjadi beberapa perubahan permintaan atas rig yang diperlukan. Perubahan itu terjadi karena rig yang disediakan Sapta tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Sapta seharusnya sudah harus didatangkan sebelum April 2002, namun ternyata baru bisa dipenuhi pada 11 Agustus 2002. Singkat cerita, kegagalan Sapta memenuhi kontrak tersebut akhirnya membuat Conoco mengalami kerugian, baik dari utang yang belum dibayar, kewajiban penalti, maupun kerugian langsung. Total kerugian yang dicatat oleh Conoco sebesar US\$5,19 juta (sekitar Rp49 miliar). Conoco lalu menghentikan kontrak dengan Sapta pada 7 Februari 2003.

Pada awal persidangan ini, tergugat ConocoPhillips telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dengan alasan bahwa dasar adanya hubungan hukum perikatan antara penggugat (Saptasarana) dan tergugat semata-mata disebabkan oleh kontrak TE 10707/ RD. Dalam kontrak tersebut, katanya, terdapat ketentuan klausul penyelesaian sengketa, yakni diselesaikan melalui jalur arbitrase dengan menggunakan ICC Rules (International Chamber of Commerce Arbitration Rules 1998).. Akan tetapi, pada kenyataannya gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat putusan sela itu, PN Jakpus telah menolak eksepsi ConocoPhillips mengenai kewenangan absolut pengadilan. Pertimbangan hukum dari penolakan itu karena majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa bukanlah mengenai hal-hal yang diatur dalam kontrak TE 10707/RD. Merujuk pada ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase yang menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Jadi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini dan seharusnya

menyerahkan sengketa ini ke lembaga arbitrase yang telah ditentukan.

Kelima kasus di atas mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada juga yang langsung mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahkan sampai Mahkamah Agung, padahal di dalam perjanjian ada klausul arbitrasenya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Disini para pihak tidak mengajukan sengketa ke lembaga arbitrase yang dipilih sesuai dengan perjanjiannya. Ketua Pengadilan Negeri pun mau mengabulkan gugatan yang diajukan para pihak. Karena hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga Ketua Pengadilan Negeri tetap mengabulkan gugatan yang diajukan kepadanya, walaupun di dalam Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 sudah ditegaskan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang ada klausul arbitrasenya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Pelaksanaan dan pengakuan keputusan arbitrase asing di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Mahkamah Agung. Upaya hukum terhadap putusan arbitrase asing tidak dapat dilakukan karena putusan arbitrase bersifat *final and binding*, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum baik berupa, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). Akan tetapi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap suatu putusan arbitrase asing dengan permohonan pembatalan dan penolakan terhadap putusan arbitrase asing tersebut.

Pelaksanaan putusan arbitrase asing tidak mudah, karena masih banyak hambatan dalam melaksanakan putusan arbitrase asing tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pihak yang bersengketa mengajukan gugatan dan melakukan banding maupun kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Padahal dalam kontrak perjanjian telah disebutkan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase (ada klausul arbitrase).

Dari kelima kasus diatas, para pihaknya mengajukan gugatan dan pembatalan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sampai juga ke Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan kepadanya walaupun ada klausul arbitrase. Disini hakim adalah orang yang dianggap mengerti hukum (*Ius Curianovit*) sehingga tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan kelima

sengketa diatas, antara lain karena ; ketentuan hukum yang mengatur masalah arbitrase di Indonesia belum banyak diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis, belum adanya budaya *arbitration minded* di kalangan pengusaha Indonesia, banyak pengusaha yang belum berani membawa sengketa ke jalur non-litigasi karena selama ini mereka belum mengetahui keberhasilan arbitrase dalam menangani sengketa bisnis, profesionalitas dan kredibilitas arbiter dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia belum banyak diketahui oleh pelaku bisnis, belum banyak konsultan hukum Indonesia yang mau memperkenalkan/mengarahkan kliennya untuk bersengketa melalui Lembaga Arbitrase, tidak mudah membawa dan menyadarkan pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan para pihak yang menggunakan arbitrase khususnya pihak yang kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan tersebut, kurangnya pemahaman dan pengetahuan hakim-hakim tentang masalah arbitrase sehingga seringkali suatu sengketa yang berdasarkan klausul arbitrase seharusnya diselesaikan melalui arbitrase, namun Pengadilan Negeri tetap saja menangani sengketa tersebut. Sehingga penggunaan lembaga arbitrase di Indonesia tidak berkembang.

B. Saran

1. Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 hendaknya diberikan penjelasan mengenai ketertiban umum agar lebih jelas batasannya. Sehingga pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk memeriksa sengketa yang ada klausul arbitrase di dalam perjanjiannya. Akan tetapi, para pihak banyak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Untuk dapat terlaksananya Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Arbitrase ini, sebaiknya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) agar Ketua Pengadilan Negeri tidak menangani sengketa yang ada klausul arbitrasenya.

(2) DAFTAR PUSTAKA

(3) Buku-Buku

- (4) A. Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- (5) Abdul Bari Azed. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang : Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
- (6) Adi Sulistiyono. 2006. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*. Surakarta : UNS Press.
- (7) Akhmad Ichsan. 1992. *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- (8) Djazuli Bachar. 1995. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakkan Hukum*. Jakarta : Akapres.
- (9) Huala Adolf. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.
- (10) _____. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional Edisi Revisi*. Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada.
- (11) _____. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- (12) M. Yahya Harahap. 1991. *Arbitrase*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- (13) _____. 1993. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- (14) _____. 2003. *Arbitrase Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- (15) Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- (16) Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

- (17) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- (18) Sudargo Gautama. 1989. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. Jakarta : Eresco.
- (19) _____. 1991. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- (20) _____. 1997. *Hukum Dagang Internasional*. Bandung : Alumni.
- (21) _____. 2004. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- (22) Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- (23) Suyud Margono. 2000. *ADR Alternatif Disputes Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- (24) **Perundang-undangan**
- (25) Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945.
- (26) HIR, RBg dan Rv.
- (27) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (28) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (29) Konvensi New York Tahun 1958.
- (30) Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Konvensi New York Tahun 1958.
- (31) PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
- (32) **Jurnal**

- (33) Nassib G. Ziadé, *'Reflections on the Role of Institutional Arbitration Between the Present and the Future'* (2009) 25 *Arbitration International* pp. 427–430. (diakses tanggal 28 Maret 2010).
- (34) Dedi Harianto, *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Di Indonesia*, <http://www.library.usu.ac.id/download/fh/perda-dedi1.pdf> (diakses tanggal 28 Maret 2010)).
- (35) **Internet**
- (36) Ade Didik Irawan, *penyelesaian alternatif sengketa hukum dagang*, <http://www.mypulau.com/adedidikirawan/blog/> (diakses tanggal 27 Juli 2009)
- (37) *Arbitration.com* (diakses tanggal 1 Maret 2009).
- (38) Dion Barus. [Putusan Komersial Arbitrase Asing di Indonesia.](#)
- (39) <http://dionbarus.wordpress.com/2008/03/03/putusan-komersial-arbitrase-asing-di-indonesia> (diakses tanggal 17 Juli 2009).
- (40) Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia* <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html>. (diakses tanggal 29 April 2010).
- (41) **Kamus**
- (42) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.1989.